

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, SANKSI PERPAJAKAN, DAN
RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh :

Elisa Martha Hanum Basyaroh

1705046070

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Elisa Martha Hanum Basyaroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Assalamua'laikum Wr. Wb.
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini
saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Elisa Martha Hanum Basyaroh
Nomor Induk : 1705046070
Judul : Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Sanksi
Perpajakan, dan Religiusitas terhadap
KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi di Kota
Semarang

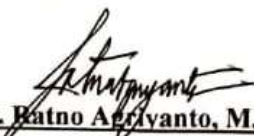
Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosyahkan.


Wassalamua'laikum Wr. Wb.

Semarang, 21 April 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ratno Agriyanto, M. Si.,Akt
NIP. 19800128 200801 1 010


Dessy Noor Farida, SE, M. Si, AK CA.
NIP. 19791222 201503 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Elisa Martha Hanum Basyaroh
NIM : 1705046070
Judul : Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Sanksi Perpajakan, dan
Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

26 APRIL 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021

Semarang, 26 April 2021

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



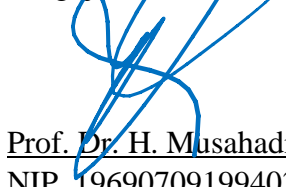
Arif Efendi, S.E., M.Sc
NIP. 198505262013031002



Dessy Noor Farida, SE., M.Si., A.Kt
NIP. 197912222015032001

Penguji Utama I

Penguji Utama II



Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag.
NIP. 196907091994031003



Dr. Ari Kristin Prastyoningrum, S.E., M.Si
NIP. 197905122005012004

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., A.Kt
NIP. 198001282008011010



Dessy Noor Farida, SE., M.Si., A.Kt
NIP. 197912222015032001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu..”

-QS. An-Nisa':59-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya serta memberikan perlindungan dalam setiap langkah, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Shalawat serta salam haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan yang ada dan selalu mengharapkan syafa'at beliau di hari akhir nanti. Karya ini penulis persembahkan dengan setulus hati kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Ir. Januar Basyaroh dan Ibu Karsumiyati yang selalu memberikan kasih sayang serta dukungan, lantunan do'a yang tak pernah putus selalu mengiringi langkah penulis. Semoga segala pengorbanan baik moral maupun materil selama ini dapat diterima dan diridhoi oleh Allah SWT.
2. Kakak tersayang Fathon Dipa Basyaroh dan Adik tersayang Ali Rahman Abdillah yang selalu memberikan motivasi dan menghibur dikala penulis merasa lelah dan bosan. Adanya *love hate relationship* antara kakak dan adik tidak dipungkiri justru memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan karya ini.
3. Sahabat – sahabat penulis yang sudah mendengarkan keluh kesah, memberikan saran, serta support tiada henti.
4. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang, 20 April 2021

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 April 2021

Deklarator



Elisa Martha H.B

1705046070

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

ā = a

ī = i

ū = u

C. Diftong

ai = ay

au = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misal الطَّبَّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al*... misalnya **الصناعة** = *al-shina'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya **المعيشة الطبيعية** = *al-ma'isyah al-thabi'yyah*.

ABSTRACT

Taxes are the largest revenue received by the State. However, the level of taxpayer compliance is still very low. There are internal and external factors that cause the low level of taxpayer compliance. The low compliance of taxpayers is something that needs to be studied, therefore this study aims to analyze the effect of the application of the e-filing system, tax sanctions, and religiosity on the compliance of individual taxpayers in the city of Semarang partially.

This research is a quantitative research whose analysis uses the SPSS'23 application. The population in this study were all individual taxpayers who live in the city of Semarang. Sampling was done by accidental sampling method with a total sample of 80 individual taxpayers.

The results of this study indicate that the application of the e-filing system has an effect on taxpayer compliance. this is because the existence of an e-filing system makes it easy for taxpayers so that it can increase the level of taxpayer compliance. Tax sanctions affect taxpayer compliance. This is because the stronger tax sanctions will cause fear to the taxpayers, so that taxpayers will be more obedient. Religiosity does not have a significant effect on taxpayer compliance. This is because the more a religious person is, the more their perceptions will change to prioritize their relationship with God rather than their relationship with humans as leaders.

Keywords: taxpayer compliance, e-filing system, tax sanctions, religiosity

ABSTRAK

Pajak merupakan pendapatan terbesar yang diterima Negara. Akan tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. Ada faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang perlu untuk dikaji, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filing*, sanksi perpajakan, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikota Semarang secara parsial.

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang analisisnya menggunakan aplikasi SPSS'23. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di kota Semarang. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *accidental sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 80 wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini dikarenakan dengan adanya sistem *e-filing* memberikan kemudahan bagi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin tegasnya sanksi perpajakan akan menimbulkan rasa takut kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak akan bersikap lebih patuh. Religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin seorang religius maka persepsi mereka akan berubah lebih mengutamakan hubungannya dengan Tuhan dari pada hubungannya dengan manusia sebagai pemimpin.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, sistem *e-filing*, sanksi perpajakan, religiusitas

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang”**. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak dan mengharapkan syafa’at dari beliau.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, serta dorongan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA., CPAI. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Warno, SE., Msi. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah yang selalu memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA., CPAI. selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan semangat, motivasi, bimbingan serta arahan dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dessy Noor Farida, SE, M.Si, AK CA. selaku dosen pembimbing II yang selalu bersedia meluangkan waktu membimbing, mengarahkan, serta mengoreksi dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta bimbingan selama penulis menempuh pendidikan.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Akuntansi Syari’ah yang memberikan motivasi dan pelajaran berharga.
9. *Spesial Person*, Topan Wijaya P yang selalu memberi semangat, mendengarkan keluh kesah, serta sabar menghadapi *moody*-an karena mengerjakan skripsi ini.

10. Hasdian Kharisma S dan Nina Nuraina, yang selalu siap sedia menjawab pertanyaanku tentang skripsi, membimbingku dengan sabar, serta memberikan saran terbaik untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat – sahabat tercinta yang sudah mendengarkan keluh kesah serta support tiada henti..
12. Diri sendiri yang selalu berjuang dan tak pernah lelah untuk menggapai masa depan dan membanggakan orang tua. Terimakasih, kamu hebat sudah bisa mencapai titik ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penyelesaian karya ini.

Terimakasih, semoga Allah SWT akan membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang banyak dan balasan yang terbaik. Aamiin.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki dan membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi pembaca.

Semarang, 20 April 2021

Elisa Martha H.B

NIM. 1705046070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Atribusi	9
2.2 Pengertian Pajak	10
2.3 Peranan Pajak	11
2.4 Jenis-Jenis Pajak.....	12
2.5 Subjek dan Objek Pajak.....	13
2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak	14

2.7	Tarif Pajak	15
2.8	Sistem E-filling.....	16
2.9	Sanksi Perpajakan.....	17
2.10	Religiusitas	19
2.11	Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.12	Pajak dalam Perspektif Islam.....	21
2.13	Sanksi Perpajakan dalam Perspektif Islam	26
2.14	Kepatuhan dalam Perspektif Islam	28
2.15	Penelitian Terdahulu.....	29
2.16	Rumusan Hipotesis	31
2.16.1	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	31
2.16.2	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	33
2.16.3	Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	33
2.17	Kerangka Pemikiran	34
BAB III	36
METODE PENELITIAN	36
3.1	Jenis Penelitian	36
3.2	Jenis dan Sumber Data	36
3.3	Populasi dan Sampel.....	36
3.4	Metode Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel	37
3.5	Teknik Pengumpulan Data	37
3.6	Definisi Operasional Variabel Penelitian	37
3.7	Analisis Data	40
3.7.1	Statistik Deskriptif	40
3.7.2	Uji Instrumen	40
3.7.3	Uji Asumsi Klasik.....	41
3.7.4	Pengujian Hipotesis	42
BAB IV	45
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	45
4.1	Gambaran Umum Responden	45
4.2	Analisis Data	46
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	46

4.2.2	Uji Validitas dan Reliabilitas	47
4.2.3	Uji Asumsi Klasik.....	49
4.2.4	Analisis Regresi Linear Berganda.....	52
4.2.5	Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)	54
4.2.6	Uji Koefisien Determinan (R ²).....	56
4.3	Pembahasan Hasil Analisis Data	56
4.3.1	Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	56
4.3.2	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	57
4.3.3	Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	58
BAB V	60
KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1	Kesimpulan.....	60
5.3	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi Penerapan Pajak	2
Tabel 2 Kepatuhan Wajib Pajak	3
Tabel 3 Tarif Progresif	16
Tabel 4 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 5 Variabel, Definisi Operasi, dan Skala Pengukuran Variabel Penelitian	38
Tabel 6 Demografi Responden.....	45
Tabel 7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	46
Tabel 8 Hasil Uji Validitas	47
Tabel 9 Hasil Uji Reliabilitas	48
Tabel 10 Hasil Pengujian Normalitas.....	49
Tabel 11 Hasil Pengujian Multikolonieritas.....	50
Tabel 12 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas.....	52
Tabel 13 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	53
Tabel 14 Hasil Pengujian Koefisien Regresi Parsial (uji t)	55
Tabel 15 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran	35
------------------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pajak sudah dikenal sejak zaman nenek moyang pada masa kerajaan. Pada saat itu rakyat diwajibkan membayar upeti yang besarnya ditentukan oleh raja. Upeti yang dimaksud yaitu berupa hasil bumi ataupun harta benda lainnya. Setelah Indonesia merdeka, pajak ditetapkan dan dipungut oleh Negara. Berbeda dengan upeti yang membebani rakyat, pajak ini merupakan bentuk kontribusi pembangunan dari rakyat Indonesia, juga merupakan bentuk dari partisipasi rakyat dalam mengisi kemerdekaan.

Sistem perpajakan dalam islam juga sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Saat Rasulullah menjalankan roda pemerintahan, pendapatan Negara diperoleh dari lima sumber, diantaranya harta rampasan perang (ghanimah), harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan (fai), zakat, pajak tanah (kharaj), dan pajak kepala (jizyah). Saat ini umumnya penerimaan Negara hanya diperoleh dari pajak dan zakat. Namun tidak semua Negara di dunia memasukkan zakat dalam instrument penerimaan kas negara. Sementara untuk sumber pendapatan berupa ghanimah dan fai tidak lagi diterapkan.¹ Berdasarkan pendekatan hukum Islam, istilah pajak terdiri dari *kharaj* (pajak bumi/tanaman), *usyur* (pajak perdagangan/bea cukai), dan *jizyah* (pajak jiwa terhadap non-muslim yang hidup di dalam naungan Negara/pemerintah Islam). Pajak juga dikenal dengan nama *Al-Maksayau Adh-Dharibah* berarti pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Pajak dalam tinjauan Bahasa arab yaitu *dharibah* yang berarti utang yang mesti dibayar. Secara syari'ah pajak adalah kewajiban yang diterapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi atau imbalan langsung dari Negara².

Pengertian pajak sesungguhnya masih belum jelas artinya. Namun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan

¹ Khazanah, "Sistem Perpajakan di Masa Rasulullah," Republika.com, 2016, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/03/16/omwyss313-sistem-perpajakan-di-masa-rasulullah>.

² Nurul Ichsan Hasan, "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia," *Islamadina* 19, no. 2 (2018): 75, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v19i2.2628>.

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ³. Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa imbalan (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum/public investment ⁴. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib bagi warga Negara berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa, tanpa adanya kontraprestasi atau timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah bagi kemakmuran rakyat.

Sumber pendapatan dalam negeri terdiri dari dua penerimaan yaitu yang pertama penerimaan pajak dan yang kedua penerimaan bukan pajak. Pendapatan sektor pajak merupakan pendapatan terbesar yang diterima oleh Negara ⁵. Oleh karena itu pajak sangatlah penting bagi Negara, dengan pajak Negara dapat membiayai pengeluarannya yang bersifat umum. Sumber pendapatan utama penerimaan Negara yang terutang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagian besar adalah dari pajak. Berikut data realisasi penerimaan pajak empat tahun terakhir.

Tabel 1
Realisasi Penerapan Pajak tahun 2015-2018
(dalam triliun rupiah)

Tahun	APBNP	Realisasi Penerimaan Pajak
2015	1.489,2	1.240,4
2016	1.539,2	1.284,9
2017	1.472,7	1.343,5
2018	1,609,3	1.518,7

Sumber: LKPP Tahun 2015,2016,2017, dan 2018 (data diolah)

Uraian dari tabel diatas bahwa realisasi penerimaan pajak masih dibawah APBNP atau belum sesuai dengan yang direncanakan, oleh karena itu pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Banyak usaha-usaha yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

³ Isroah, *Perpajakan* (Yogyakarta: UNY, 2013).

⁴ Hasan, "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia."

⁵ Made Okvan Dwi Purwadi dan Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Religiusitas , Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *e-Jurnal Akuntansi* 28, no. 3 (2019): 2110–25.

untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Usaha-usaha tersebut meliputi sensus pajak yang diharapkan semua Wajib Pajak Pribadi maupun Badan yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat segera melaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan, selain itu pemerintah juga melakukan revolusi pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* tujuannya adalah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak terutang ⁶.

Pada awal kemerdekaan, sistem pemungutan pajak berdasarkan *Official Assessment System* yaitu pihak yang penentuan jumlah pajak terutang dari Wajib Pajak ditetapkan oleh aparat pajak. Sejak reformasi perpajakan di Indonesia pada tahun 1984, sistem pemungutan pajak yang baru diperkenalkan di Indonesia yaitu *Self Assessment System*. Sistem ini memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan utang pajaknya sendiri, membayar pajak terutang ke bank tempat pembayaran pajak dan kantor pos serta melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke kantor Pelayanan Pajak. Pada sistem ini aparat pajak bertugas untuk mengawasi, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak ⁷.

Permasalahan yang masih sering terjadi berkaitan dengan pemungutan pajak ini yaitu masih banyaknya masyarakat yang menghindari atau tidak mau membayar kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia untuk membayar kewajiban pajaknya masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Direktorat Jenderal Pajak pada laporan kinerja DJP tahun 2019 bahwa “target Indikator Kinerja Utama (IKU) telah tercapai akan tetapi kepatuhan Wajib Pajak tergolong *masih rendah*”.

Tabel 2
Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Target Kepatuhan Wajib Pajak	Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak
2017	50%	62,96%
2018	65%	69,30%
2019	70%	72,52%

Sumber: LAKIN DJP 2017,2018,2019 ⁸ data diolah

Kepatuhan pajak pada umumnya diartikan sebagai situasi dimana wajib pajak membayar semua pajak yang diwajibkan pada waktu yang tepat dan melaporkannya secara akurat sesuai

⁶ Fahmi Hanifiyatun, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan,” *Journal Article*, 2016, 1–21.

⁷ Direktorat Jenderal Pajak, “Lebih Dekat Dengan Pajak,” in *Buku Panduan Pajak*, 2013, 23.

⁸ Direktorat Jenderal Pajak, “Halaman Laporan Kinerja DJP,” DJP, 2019, <https://www.pajak.go.id/id/kinerja-page>.

dengan aturan, undang-undang, serta keputusan pengadilan yang berlaku pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak ⁹. Dapat dilihat pada tabel 2 bahwa pada tahun 2019, realisasi rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan sebesar 72,52% dari target yang telah ditetapkan sebesar 70%. Kepatuhan penyampaian pajak pada tahun 2019 naik dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 69,30%. Walaupun telah melebihi target yang ditetapkan dan telah naik dari tahun sebelumnya, namun belum optimal dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak tahun 2019.

Faktor penting dalam penarikan pajak yaitu sikap patuh wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Namun kenyataannya, masih sering terjadi wajib pajak yang berupaya menghindari kewajiban perpajakannya. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak, diantaranya yaitu ketidak puasaan masyarakat terhadap pelayanan public, hasil dari pemungutan pajak yang tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak, dan masih banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat Negara.

Dalam penelitian kepatuhan wajib pajak ini peneliti menggunakan teori atribusi. Teori atribusi ini dikembangkan Fritz Heider (1958) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal (*internal force*) dan eksternal (*external force*). Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu seperti kemampuan atau usaha, sedangkan factor eksternal adalah factor yang timbul dari luar individu seperti kesulitan atau keberuntungan dalam pekerjaan. Teori atribusi secara formal didefinisikan sebagai salah satu upaya untuk mencari tahu factor pendorong seseorang dalam berperilaku dan beberapa diantaranya melakukan untuk mengetahui factor pendorong perilaku diri sendiri ¹⁰. Teori atribusi relevan dengan penelitian ini. relevansinya yaitu bahwa wajib pajak dalam menentukan sikap patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya di pengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi faktor internal dan eksternal hal ini dapat dilihat dari teori dan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini berfokus pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini yakni religiusitas, sedangkan faktor eksternalnya yakni penerapan sistem *e-filing* dan sanksi perpajakan.

⁹ Gebi Sintia Dwi, Aries Tanno, dan Novel Ismail, "PENGARUH PENERAPAN E-SISTEM, SANKSI PAJAK, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK PRIBADI PELAKU BISNIS DI KPP PRATAMA BUKITTINGGI)," *Jurnal Benefita* 4, no. 3 (2019): 477–91.

¹⁰ Gusti Ayu Raisa Ersania dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 22, no. 3 (2018): 1882–1908.

E-filling menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 merupakan cara menyampaikan secara elektronik mengenai surat pemberitahuan (SPT) secara *online* dan *real time* yang diakses pada website resmi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Adanya *E-filling* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan untuk Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT sebab dapat dilakukan, atau dikirim dimana saja dan kapan saja, sehingga penerapan sistem *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Peneliti menggunakan variabel penerapan sistem *e-filing* dikarenakan ingin mengetahui apakah dengan penerapan sistem *e-filing* tersebut kepatuhan wajib pajak akan meningkat sesuai dengan apa yang sudah diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian Tumuli, dkk (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak yang secara tepat waktu melaporkan pajak menggunakan *e-filling* mendapatkan hasil yang baik ¹¹. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Dwi, dkk (2019) yang menyatakan penerapan *e-system* (*e-filling*) dan tegas sanksi yang ditetapkan maka kepatuhan wajib pajak akan ikut meningkat ¹². Namun hasil yang berbeda dalam penelitian Suherman, dkk (2015) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan karena masih ada wajib pajak orang pribadi yang belum sadar dan menunaikan kewajiban perpajakannya. ¹³

Menciptakan keteraturan dan ketertiban pajak, perlu dibuat suatu sanksi pajak bagi para pelanggar pajak. Sanksi tersebut sebagai jaminan agar peraturan perundangan-undangan tentang perpajakan dapat dipatuhi. Penggunaan variabel sanksi perpajakan dikarenakan peneliti ingin membuktikan apakah dengan adanya sanksi yang tegas akan merubah pola pikir wajib sanksi pajak sehingga menyebabkan wajib pajak menjadi lebih patuh akan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Savitri & Nuraina (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Apabila Direktorat Jenderal Pajak memberikan sanksi perpajakan dengan tegas maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sanksi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajiban perpajakannya serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib

¹¹ Apriliani Kasandra Tumuli, Jullie J Sondakh, dan Heince Wokas, "ANALISIS PENERAPAN E-SPT DAN E-FILING DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO)," *Jurnal EMBA* 4, no. 3 (2016): 102–12.

¹² Dwi, Tanno, dan Ismail, "PENGARUH PENERAPAN E-SISTEM, SANKSI PAJAK, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK PRIBADI PELAKU BISNIS DI KPP PRATAMA BUKITTINGGI)." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informatika* 15, no. 1 (2015): 49–64.

¹³ Maman Suherman, Medina Almunawwaroh, dan Rina Marliana, "WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA TASIKMALAYA," *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informatika* 15, no. 1 (2015): 49–64.

pajak¹⁴. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Siregar (2017) yang menunjukkan dalam kompenennya antara variabel kesadaran pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak¹⁵. Hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Wardani dan Rumiya (2017) menyatakan bahwa Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁶

Religiusitas dalam penelitian ini merujuk pada tingkat keterikatan seseorang dengan agama. Berdasarkan penerapan nilai-nilai keyakinan, agama, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari, komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas seseorang. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak¹⁷. Peneliti menggunakan variabel religiusitas sebab berdasarkan teori yang ada religiusitas dapat mencegah seseorang berperilaku menyimpang, sehingga dalam hal ini religiusitas dapat mempengaruhi wajib pajak agar bersikap patuh akan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan Ermawati & Afifi (2018) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Sebagai wajib pajak yang baik seharusnya mematuhi segala peraturan perpajakan sama halnya dengan mematuhi agama¹⁸. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Faisal & Yulianto (2019) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena religiusitas yang tinggi belum menentukan tindakan wajib pajak terutama dalam hal membayar pajak¹⁹.

Adanya hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang masih belum konsisten mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing*, sanksi perpajakan dan religiusitas menjadikan penulis

¹⁴ Faradilla Savitri dan Elva Nuraina, "Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama madiun," *equilibrium* 5, no. 1 (2017): 45–55.

¹⁵ Dian Lestari Siregar, "Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam," *Jurnal of Accounting & Management Innovation* 1, no. 2 (2017): 119–28.

¹⁶ Dewi Kusuma Wardani dan Rumiya, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2017): 15, <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>.

¹⁷ Dwi, Tanno, dan Ismail, "PENGARUH PENERAPAN E-SISTEM, SANKSI PAJAK, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK PRIBADI PELAKU BISNIS DI KPP PRATAMA BUKITTINGGI)."

¹⁸ Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi, "PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING," *Jurnal Akuntansi Indonesia* 7, no. 2 (2018): 49–62.

¹⁹ Muchamad Faisal dan Agung Yulianto, "RELIGIUSITAS, NORMA SUBJEKTIF DAN PERSEPSI PENGELUARAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG KEPATUHAN WAJIB PAJAK," *Jurnal Kajian Akuntansi* 3, no. 2 (2019): 170–83.

tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian ini menambah variabel penerapan sistem *e-filing* dan *religiusitas* yang masih jarang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di kota Semarang. Metode pengambilan sampel ini dengan *accidental sampling*. Berdasarkan data, fenomena yang terjadi dan adanya *research gap* antara peneliti sebelumnya, maka peneliti mengambil judul **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, SANKSI PERPAJAKAN, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA SEMARANG)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti mengambil beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, terdapat tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh religusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pembaca : penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan tentang tingkat pemahaman *e-filling*, sanksi pajak, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi : penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
- c. Bagi Peneliti : penelitian ini diharapkan menjadi wadah untuk mengaplikasikan yang diperoleh selama perkuliahan dan sebagai hasil akhir dari penempuhan Strata Satu Jurusan Akuntansi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang diperlukan untuk penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis, serta kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode atau langkah-langkah yang dilakukan untuk penelitian, meliputi jenis penelitian, populasi, sampel, sumber data, variabel dan pengukurannya, serta analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang uraian dan hasil yang dilakukan peneliti yang terdiri dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan atau menguraikan tentang gambaran umum dari objek penelitian, hasil-hasil data serta pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan pembahasan yang sebelumnya dan saran terhadap penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Fritz Heider (1958) mencetuskan teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang proses penentuan penyebab atau motif dari perilaku seseorang. Dalam teori ini menjelaskan bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang ditentukan berdasarkan kekuatan internal ataupun kekuatan eksternal. Kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya sikap, karakter, sifat, dan lain-lain, sedangkan kekuatan eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan mempengaruhi perilaku individu ¹. Menurut Robbins & Judge (2008) perilaku dapat disebabkan secara internal yaitu perilaku yang ada dalam kendali pribadi seseorang, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh faktor luar, atau dalam arti lain individu terpaksa berperilaku karena suatu kondisi atau keadaan ².

Ada tiga faktor dalam menentukan apakah perilaku individu disebabkan secara internal atau eksternal, yaitu ³:

1) Perbedaan (*Distinctiveness*)

Perbedaan yang mengacu pada apakah individu bertindak sama dalam berbagai keadaan. Jika perilaku individu dianggap suatu yang luar biasa, maka pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika tindakan tersebut dianggap biasa, maka pengamat akan menilai sebagai atribusi internal.

2) Konsensus (*Consensus*)

Membandingkan bagaimana perilaku individu dengan individu lain dalam keadaan atau situasi yang sama. Jika semua orang dihadapkan dalam keadaan yang sama dan menanggapi keadaan tersebut dengan cara yang sama, maka perilaku individu tersebut masuk dalam atribusi eksternal. namun jika perilaku individu berbeda dengan individu lain, maka perilaku individu tersebut merupakan atribut internal.

3) Konsistensi (*Consistency*)

¹ Arfan Ikhsan dan Muhammad Ishak, *Akuntansi Keperilakuan* (Jakarta: Salemba Empat, 2005).

² Stephen P Robbins dan Timothy A Judge, *Perilaku Organisasi*, Edisi 12 (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

³ Arfan Ikhsan Lubis, *Akuntansi Keperilakuan*, Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

Konsistensi pada suatu tindakan yang diulangi dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku individu, maka orang akan mengaitkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang merupakan faktor internal yaitu kesadaran akan memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, dan faktor pendorong dari dalam diri wajib pajak agar bersikap patuh, sedangkan faktor eksternal yaitu kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan publik, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak, sanksi yang tegas terhadap pelanggar pajak, dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata.⁴ Teori atribusi relevan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak, sebab perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat ditentukan dari faktor internal dan eksternal. dalam penelitian ini faktor internal menggunakan religiusitas. Faktor eksternal yang digunakan penerapan sistem *e-filing* dan sanksi perpajakan.

2.2 Pengertian Pajak

Para ahli dibidang perpajakan banyak yang memberikan definisi atau pengertian yang berbeda mengenai pajak, namun dari berbagai definisi tersebut memiliki dasar yang sama yaitu tujuan dan intinya untuk merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Menurut beberapa ahli, pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Parju mendefinisikan pajak sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat yang wajib membayarnya kepada Negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), dengan tidak dapat mendapatkan prestasi kembali yang langsung dan digunakan untuk membiayai pembangunan⁵. Mardiasmo menyatakan bahwa, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum⁶. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

⁴ Ovi Itsnaini Ulynnuha, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta)," *Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2018), http://eprints.ums.ac.id/59686/17/Naskah_Publikasi-216.pdf.

⁵ Parju, *PERPAJAKAN* (Semarang, 2017).

⁶ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat untuk Negara, artinya yang memiliki hak untuk memungut pajak adalah Negara dan iuran tersebut berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan undang-undang, artinya pajak dipungut berdasarkan undang-undang beserta aturan dalam pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa imbal balik atau kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjuk, artinya didalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.⁷

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib bagi warga Negara berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa, tanpa adanya kontraprestasi atau timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah bagi kemakmuran rakyat.

2.3 Peranan Pajak

Berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi untuk mendorong tercapainya suatu masyarakat yang adil serta secara merata hidup makmur. Menurut Parju (2017) ada dua fungsi pajak, yaitu ⁸:

1. Fungsi Budgeter

Pajak mempunyai fungsi budgeter artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Mengatur

Pemungutan pajak didasarkan dengan memperhatikan keadaan social ekonomi dalam masyarakat.

Sesuai dengan pernyataan Mardiasmo (2016) bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu ⁹ :

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

⁷ Mardiasmo.

⁸ Parju, *PERPAJAKAN*.

⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*.

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social ekonomi.

Berdasarkan beberapa penjelasan fungsi pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa pajak sebagai fungsi anggaran atau budgeter merupakan sumber dana utama bagi penerimaan kas Negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan. Oleh karena itu sesuai dengan undang-undang perpajak pemungutan pajak dapat dipaksakan bagi wajib pajak. Kemudian dalam fungsi mengatur, pajak memiliki fungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social ekonomi, misalnya pencegahan penggunaan minuman keras dengan cara menaikkan cukai setinggi-tingginya.

2.4 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain.
Contoh: pajak penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: pajak pertambahan nilai.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: pajak penghasilan
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Menurut lembaga pemungutnya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas ¹⁰:

- Pajak propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.5 Subjek dan Objek Pajak

Subjek pajak menurut Waluyu (2017) yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap¹¹.

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnnya termasuk kontrak investasi kolektif

4. Badan Usaha Tetap

Bentuk badan usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan, dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

¹⁰ Mardiasmo.

¹¹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

Objek pajak menurut Waluyo (2017) diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak untuk PPh adalah penghasilan. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi¹²:

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas..
- 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- 3) Penghasilan dari modal atau investasi.
- 4) Penghasilan lain-lain.

2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016) terdiri dari Stesel Pajak, Asas Pemungutan Pajak, dan Sistem Pemungutan Pajak ¹³.

a. Stesel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stesel, yaitu:

1. Stesel nyata (*riel stesel*)

Penanganan pajak didasarkan pada objek (penghasilan nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stesel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stesel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

2. Stesel anggapan (*fictieve stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stesel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stesel campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak

¹² Waluyo.

¹³ Mardiasmo, *Perpajakan*.

menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaiknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.7 Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2017) Struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak dikenal empat macam tarif, yaitu sebagai berikut ¹⁴:

1. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding, yaitu tarif pajak berupa presentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.
Contoh: dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.
2. Tarif Pajak Progresif, yaitu tarif pajak yang presentasinya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

¹⁴ Waluyo, *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*.

Contoh tarif pajak Penghasilan tahun pajak 2009 yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, yakni:

Tabel 3
Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber : Buku Perpajakan¹⁵

3. Tarif Degresif, yaitu presentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.
4. Tarif Pajak Tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap.

Contoh: Bea Materai.

2.8 Sistem E-filling

E-filling adalah bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak¹⁶. Penerapan sistem *E-filling* merupakan suatu cara memanfaatkan sistem atau fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang *realtime* pada website DJP (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider* (ASP)).

¹⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*.

¹⁶ Lina Nurlaela, "Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut," *Jurnal Wahana Akuntansi* 02, no. 02 (2017): 001–008.

Layanan melalui situs pajak yang dapat menyampaikan SPT Tahunan secara *e-Filling* melalui *website* DJP hanya diperuntukan bagi wajib pajak orang pribadi dengan syarat yaitu untuk menyampaikan SPT Tahunan dengan menggunakan formulir SPT Tahunan 1770 S atau formulir 1770 SS¹⁷. Bagi wajib pajak yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat menggunakan layanan *e-Filling* melalui Penyedia Jasa Aplikasi. Ada beberapa media pelengkap *e-Filling* yaitu Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), Surat permohonan memperoleh *Electronic Filling Identification Number (e-FIN)*, *Digital Certificate*, e-SPT, bukti penerimaan e-SPT.

Menurut Tumuli, dkk (2016), penggunaan aplikasi *e-Filling* dalam melakukan pelaporan SPT memiliki beberapa kelebihan, yaitu¹⁸:

1. Penyerahan SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja.
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
3. Perhitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem computer.
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
5. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (fotokopi formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSp Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPh terutang bagi wajib pajak kawin pisah harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi bukti pembayaran zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

2.9 Sanksi Perpajakan

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

¹⁷ Ersania dan Merkusiwati, "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

¹⁸ Tumuli, Sondakh, dan Wokas, "ANALISIS PENERAPAN E-SPT DAN E-FILING DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO)."

Kemungkinan dapat terjadi kepada Wajib Pajak atau seseorang yang melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

Setiap seseorang dengan sengaja ¹⁹ :

1. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, atau pengukuhan PKP (Perhatikan pasal 2 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan);
2. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Penghasilan Kena Pajak;
3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
5. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan (perhatikan Pasal 29 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan);
6. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan yang sebenarnya;
7. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, dokumen lainnya;
8. Meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya;
9. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data diri pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang KUP; atau
10. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Menurut Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan ²⁰. Sanksi perpajakan diartikan sebagai jaminan bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat menjadikan wajib pajak patuh.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sebagai berikut ²¹ :

¹⁹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*.

²⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*.

²¹ Mardiasmo.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi didefinisikan sebagai pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa Bunga dan kenaikan atau denda.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana didefinisikan sebagai siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

2.10 Religiusitas

Menurut Glock dan Stark (dalam Jalaluddin, 2004) mengatakan bahwa religiusitas adalah keseluruhan dari fungsi jiwa individu mencakup keyakinan, perasaan, dan perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran agamanya dengan mengerjakan lima dimensi keagamaan yang didalamnya mencakup tata cara ibadah wajib maupun sunatnya serta pengalaman dan pengetahuan agama dalam diri individu. Lima dimensi menurut Glok & Stark yaitu:

1. Dimensi keyakinan, merupakan dimensi ideologis yang memberikan deskripsi sejauh mana seorang menerima hal-hal yang dogmatis dari agamanya. Dalam islam, dimensi keyakinan menyangkut keyakinan iman kepada Allah, para Malaikat, Rasul, kitab-kitab Allah, surga dan neraka, serta qadha dan qadar.
2. Dimensi praktek agama, merupakan dimensi ritual yaitu sejauh mana seorang menjalankan kewajiban-kewajiban ritual agamanya, misalnya shalat, zakat, haji, membaca Al-Qur'an, doa, zikir dan lain-lain terutama bagi umat Islam.
3. Dimensi konsekuensi, menunjuk pada seberapa tingkat seseorang berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berelasi dengan dunianya, terutama dengan manusia lain. Dimensi ini meliputi perilaku suka menolong, bekerjasama, berdermawan, menegakkan keadilan dan kebenaran, berlaku jujur, memaafkan, tidak mencuri, mematuhi norma-norma Islam dalam berperilaku seksual, berjuang untuk hidup sukses dalam Islam, dan sebagainya.
4. Dimensi pengetahuan, merujuk pada seberapa tingkat pengetahuan seseorang dalam ajaran-ajaran agamanya, terutama mengenai ajaran-ajaran pokok dari agamanya, terutama yang termuat dalam kitab sucinya. Dalam islam dimensi ini menyangkut pengetahuan tentang Al-Qur'an, pokok-pokok ajaran yang harus diimani dan dilaksanakan, hukum-hukum Islam, sejarah Islam, dan sebagainya.

5. Dimensi penghayatan, merujuk pada seberapa jauh tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman religius. Dimensi ini terwujud dalam perasaan dekat atau akrab dengan Tuhan, perasaan doa-doanya sering terkabul, perasaan tentram bahagia, perasaan tawakal, perasaan khusuk ketika ibadah, dan sebagainya.

Religiusitas wajib pajak merujuk kepada tingkat hubungan antara individu dengan agama yang diharapkan dapat memberikan kontrol internal untuk memantau diri menegakkan perilaku bermoral. Variabel kunci yang digunakan dalam mengukur tingkat religiusitas adalah komitmen agama yang berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya maka mereka akan bertindak dengan bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam melakukan kewajibannya. Salah satu kewajiban wajib pajak adalah memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak dan melaporkan SPT secara tepat waktu, sehingga jika wajib pajak memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang religius cenderung berusaha untuk mematuhi norma serta aturan yang berlaku. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa religiusitas merupakan suatu keyakinan yang dimiliki seseorang yang berkaitan dengan agama yang dipercaya, tingkat pengetahuan seseorang tentang agama yang dianut dan memiliki komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip serta norma yang telah ditetapkan.

2.11 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku seorang wajib pajak yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta menggunakan seluruh haknya dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku²². Menurut Pratama (2012) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setiap tahun pada akhir bulan Januari dilakukan penetapan wajib pajak patuh²³.

Kriteria wajib pajak patuh sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Maman Suherman (dkk) bahwa berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007

²² Ersania dan Merkusiwati, "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

²³ Suherman, Almunawwaroh, dan Marlina, "WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA TASIKMALAYA."

tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu atau yang disebut dengan Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut ²⁴ :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidanakan karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan penilaian wajib pajak terhadap pajak yang tercermin pada sikap wajib pajak. Faktor internal maupun eksternal orang lain sangat berpengaruh terhadap pemikiran seseorang untuk menilai orang tersebut. Pernyataan ini berhubungan dengan teori atribusi. Berdasarkan teori atribusi jika seseorang melakukan pengamatan terhadap perilaku orang lain maka mereka ingin tahu apakah hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal ²⁵

2.12 Pajak dalam Perspektif Islam

Dalam pendekatan hukum Islam atau syariah, istilah pajak terdiri dari *kharaj* (pajak bumi/tanaman), *usyur* (pajak perdagangan/bea cukai), dan *jizyah* (pajak jiwa terhadap non-muslim yang hidup di dalam naungan Negara/pemerintahan Islam). Secara syariah pajak adalah kewajiban yang diterapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi atau imbalan langsung dari Negara. Selain itu pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah* yang berarti beban, disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang benar). Secara Bahasa, *dharibah* dalam penggunaannya

²⁴ Suherman, Almunawwaroh, dan Marlina.

²⁵ Ersania dan Merkusiwati, "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan Negara ²⁶.

Pengertian pajak menurut pendapat Yusuf Qardhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Negara ²⁷. Abdul Qadim Zallum mengatakan bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta ²⁸. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban tambahan setelah zakat, karena adanya kekurangan harta dan dapat dihapuskan jika harta sudah terpenuhi kembali. Pajak diwajibkan kepada kaum muslim yang kaya dan harus digunakan untuk kepentingan kaum Muslim bukan kepentingan umum. Pajak digunakan sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah musibah yang lebih besar.²⁹

Unsur penting yang terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat Islam, yaitu ³⁰ :

1. Diwajibkan oleh Allah SWT
2. Objek pajak adalah harta (*al-mal*)
3. Subjek pajak adalah kaum muslim yang kaya (*ghaniyyun*)
4. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Adanya ketentuan bahwa pajak diwajibkan bagi kaum muslim, menyebabkan adanya perbedaan pendapat dari para ulama zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang dalam menanggapi ketentuan tersebut. Pendapat pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali

²⁶ Hasan, "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia."

²⁷ Deny Setiawan, "Prepestif Islam Mengenai Pajak : Suatu Studi Pendahuluan," *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2010): 13–30.

²⁸ Hasan, "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia."

²⁹ Ratno Agriyanto, "REDEFINING OBJECTIVE OF ISLAMIC BANKING ; STAKEHOLDERS PERSPECTIVE IN INDONESIA," *economica* VI, no. June 2014 (2015): 77–90.

³⁰ Setiawan, "Prepestif Islam Mengenai Pajak : Suatu Studi Pendahuluan."

dibebankan kepada kaum muslim, karena kaum muslim sudah dibebani dengan kewajiban zakat. Berikut dalil-dalil syar'I yang menjadi dasar pendapat ini yaitu ³¹ :

1. Firman Allah Taala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil... (Q.S An-Nisa':29)

Berdasarkan tafsir Jalalayn dijelaskan bahwa jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris diatas sedangkan maksudnya isalah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka diantara kamu) berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.³²

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan cara yang dilarang/batil. Menurut beberapa ulama pajak merupakan salah satu jalan yang batil dalam penggunaan harta sesamanya.

2. Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

"Jangan kalian berbuat dzalim (beliau mengucapkannya tiga kali) Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya." (HR. Imam Ahmad V/72 no. 20174, dan di shahihkan oleh Al-Albani dalam shahih Wa Dhaif Jami'ush Shagir no. 1761 dan 1459).

Berdasarkan hadist tersebut, dijelaskan bahwa pajak yang dipungut kepada masyarakat adalah dilarang, karena pemungutan pajak tidak dilandaskan dari musyawarah dengan masyarakat atas kerelaan hartanya yang ditarik pajak oleh Negara.

3. Hadist Buraidah ra dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina, Rasulullah SAW Bersabda:

³¹ Gazali, "Pajak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VII, no. 1 (2015): 84–102.

³² Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, "Tafsir Jalalain," *Tafsir jalalain (terjemah)*, 2015, 448.

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ

“Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu benar-benar bertobat, sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni.” (HR. Muslim III/557 no. 4442 dan di shahihkan oleh syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadist Ash-Shahihah hal. 715-716)

Berdasarkan hadist tersebut, Rasulullah SAW menegaskan bahwa seorang melakukan perbuatan dosa ketika mengambil pajak secara dzolim, oleh karena itu seorang tersebut hendaknya segera bertaubat. Dari beberapa pendapat diatas para ulama menggolongkan pajak yang dibebankan pada kaum muslim secara zalim dan semena-mena, merupakan perbuatan dosa besar.

Pendapat kedua menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslim, jika memang Negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi beberapa syarat. Berikut dalil-dalil syar’i yang melandasi pendapat ini yaitu ³³ :

1. Ayat Al-Qur’an mengancam orang yang menolak memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan, seperti halnya dalam Surat Al Ma’un dimana Allah menganggap celaka bagi orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna bersamaan dengan orang yang berbuat riya
2. Adanya kaidah-kaidah umum hukum syara’ yang memperbolehkan. Misalnya kaidah “*mashhalih mursalah*” atas dasar kepentingan atau kaidah mencegah *mafsadat* itu lebih diutamakan daripada mendatangkan *maslahat* atau kaidah lebih memilih *mudharat* yang menimpa individu atau kelompok tertentu daripada *mudharat* yang menimpa manusia secara umum. Kas Negara yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan Negara, baik adanya ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Rakyatpun akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena Negara jatuh ke tangan musuh.
3. Adanya perintah jihad dengan harta. Islam telah mewajibkan umatnya untuk berjihad dengan harta dan jiwa sebagaimana firmankan Allah dalam AlQur’an :
QS. At-Taubah 9: Ayat 41

³³ Gazali, “Pajak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.”

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. At-Taubah 9: Ayat 41)

Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk tolong menolong kepada mereka yang membutuhkan. Jika Negara dalam keadaan krisis maka seluruh rakyat hendaknya membantu, sehingga dalam hal ini pemungutan pajak sangat diperbolehkan untuk keselamatan Negara. Perbuatan ini termasuk jihad dengan harta.

Berdasarkan tafsir Jalalayn dijelaskan bahwa dalam keadaan bersemangat ataupun dalam keadaan tidak bersemangat, dalam keadaan kuat maupun dalam keadaan lemah atau baik dalam keadaan berkecukupan maupun dalam keadaan kekurangan bahwasannya hal ini lebih baik bagi diri kalian, oleh sebab itu jangan sekali-kali kalian merasa berat. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang munafik, yaitu mereka yang enggan pergi berperang.³⁴

QS. As-Saff 61: Ayat 11

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

“(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui,” (QS. As-Saff 61: Ayat 11)

Berdasarkan tafsir Jalalayn dijelaskan bahwa kalian tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Hal ini lebih baik bagi kalian, maka kerjakanlah.³⁵

Maka tidak diragukan lagi bahwa jihad dengan harta itu adalah kewajiban lain di luar zakat. Di antara hak pemerintah dari kaum muslimin adalah menentukan bagian tiap orang yang sanggup memikul beban jihad dengan harta ini.

³⁴ As-Suyuthi dan Al-Mahally, “Tafsir Jalalain.”

³⁵ As-Suyuthi dan Al-Mahally.

Alasan utama diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan pemerintah tidak mampu mencukupi atau membiayai berbagai pengeluaran tersebut. Kalau pemerintah tidak ada biaya, maka akan timbul kemadharatan³⁶. Dari dua perbedaan pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwasannya bagi kaum muslim hanya berkewajiban membayar zakat atas harta kekayaannya, namun jika ada dalam kondisi tertentu yang membutuhkan tambahan keperluan darurat (khusus) maka diperbolehkan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*).

2.13 Sanksi Perpajakan dalam Perspektif Islam

Ada dua macam kejahatan yang terjadi dalam perpajakan yaitu kejahatan administrasi perpajakan dan kejahatan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian pendapatan Negara. Kejahatan perpajakan tersebut termasuk dalam katagori *jarimah ta'jir*, yakni sanksi hukumnya diserahkan kepada pemerintah sebagai penarik dan pengelola dana setoran pajak³⁷.

Merujuk pada ketentuan hukum Islam, jika pelanggarannya hanya sekedar bersifat administrasi maka sanksi harus sepadan, yakni sanksi administrasi. Adapun jenis sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggaranannya. Sebab dalam Islam terdapat larangan untuk berbuat zalim dalam memberikan hukuman dan berbuat adil (benar) kepada siapapun³⁸. Norma ini dapat diambil dari surat an-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Berdasarkan tafsir Jalalayn dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang kepada yang berhak menerimanya. Allah menitahkanmu agar menetapkan hukum

³⁶ Gazali, “Pajak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.”

³⁷ Farkhani, “Pidana Perpajakan dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* X, no. 2 (2016): 253–68.

³⁸ Farkhani.

dengan adil. Ayat ini turun ketika Ali r.a. hendak mengambil kunci Kakbah dari Usman bin Thalbah Al-Hajabi penjaganya secara paksa yakni ketika Nabi saw. datang ke Mekah pada tahun pembebasan. Usman ketika itu tidak mau memberikannya lalu katanya, "Seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah tentulah saya tidak akan menghalanginya." Maka Rasulullah saw. pun menyuruh mengembalikan kunci itu padanya seraya bersabda, "Terimalah ini untuk selamanya tiada putus-putusnya!" Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah. Ketika akan meninggalkan kunci itu diserahkan kepada saudaranya Syaibah lalu tinggal pada anaknya. Walaupun ayat ini turun dengan sebab khusus namun pada umumnya berlaku disebabkan persamaan diantaranya apabila kamu mengadili diantara manusia maka Allah menitahkanmu agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya nasihat yang diberikan-Nya kepadamu yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan dengan cara yang adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar akan semua perkataan lagi Maha Melihat segala perbuatan.³⁹

Berlaku juga untuk *jarimah* perpajakan yang berakibat pada kerugian pendapatan Negara, sanksinya tetap dalam ranah ta'jir karena kejahatan ini tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan pencurian. Terdapat kerugian pendapatan Negara yang berarti hilangnya uang Negara karena wajib pajak yang tidak membayar atau mengurangi jumlah pajaknya, namun pada hakikatnya harta atau dana pajak yang disetor merupakan milik wajib pajak itu sendiri. Tindakan tersebut tidak memenuhi unsur dari pengertian mencuri menurut syara'. Mencuri (*sariqah*) adalah tindakan kejahatan mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, baik dari pandangan pemilik harta yang dicuri maupun pihak lain menurut anggapan orang yang mencurinya⁴⁰.

Pelaku kejahatan tetap harus diberi hukuman atau sanksi agar kejahatan yang sama tidak terjadi kembali atau tidak akan dilakukan oleh wajib pajak lainnya, sehingga peran para *fuqaha muftahidin* atau anggota legislatif sangatlah penting untuk merumuskan berbagai sanksi *ta'jir* untuk wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan agar pelaku kejahatan merasa jera dan wajib pajak lainnya tidak melakukan kejahatan yang sama. Disini hakim juga harus mengambil tindakan, berkreasi dan inovasi untuk menentukan hukuman secara mandiri atau *ijtima'I* selama peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah perpajakan belum terwujud⁴¹. Hukuman yang baik yaitu hukuman yang dapat membuat pelaku kejahatan merasa jera.

³⁹ As-Suyuthi dan Al-Mahally, "Tafsir Jalalain."

⁴⁰ Farkhani, "Pidana Perpajakan dalam Perspektif Hukum Islam."

⁴¹ Farkhani.

2.14 Kepatuhan dalam Perspektif Islam

Kepatuhan dapat diartikan sebagai ketaatan. Taat dalam islam memiliki arti melaksanakan atau melakukan sesuatu dengan penuh rasa tulus dan ikhlas. Kepatuhan dalam islam memiliki tingkatannya sendiri sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa':59)

Menurut tafsir Jalalayn menjelaskan agar taat kepada Allah dan rasul-Nya serta pemegang-pemegang urusan atau penguasa diantaramu jika mereka menyuruhmu agar menaati Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada kitab-Nya dan sunnah-sunnah. Artinya selidikilah hal itu pada keduanya lebih baik daripada bertikai paham dan mengandalkan pendapat manusia. Ayat berikut ini turun tatkala terjadi sengketa di antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Orang munafik ini meminta kepada Kaab bin Asyraf agar menjadi hakim di antara mereka sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi saw. lalu kedua orang yang bersengketa itu pun datang kepada Nabi saw. yang memberikan kemenangan kepada orang Yahudi. Orang munafik itu tidak rela menerimanya lalu mereka mendatangi Umar dan si Yahudi pun menceritakan persoalannya. Kata Umar kepada si munafik, "Benarkah demikian?" "Benar," jawabnya. Maka orang itu pun dibunuh oleh Umar.⁴²

Pada dasarnya ketaatan manusia hanya pada Allah dan menganut pada sunah Rasul serta diimbangi dengan menaati peraturan pemimpin yang sesuai dengan aturan Allah, sehingga kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, yang tidak menyimpang dari perintah Allah maka sifatnya juga wajib untuk dilaksanakan kewajiban pajaknya sepadan dengan perintah zakat.

⁴² As-Suyuthi dan Al-Mahally, "Tafsir Jalalain."

2.15 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing*, sanksi perpajakan, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian menggunakan alat analisis yang sama namun menunjukkan hasil yang beragam, penelitian yang relevan yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain:

Pada tahun 2016, Andhika Utama dan Dudi Wahyudi melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta” menyatakan bahwa komponen Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi pada tahun 2018 yang berjudul “Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening” hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak mampu memediasi sebagian pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Gusti Ayu Raisa Ersania dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiawati yang berjudul “Pengaruh Penerapan *E-system* Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” menemukan bahwa penerapan *E-system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Jumadil Ismail, Gasim, dan Fitriningsih Amalo yang berjudul “Pengaruh Penerapan sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi” hasilnya menunjukkan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi dapat memoderasi(memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lina Nurlaela pada tahun 2017 melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut” hasil penelitiannya menyatakan Penerapan *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Made Okvan Dwi Purwadi dan Putu Ery Setiawan pada tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” hasilnya menyatakan bahwa religiusitas, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Dian Lestari Siregar pada tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam” hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran

wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 4
Penelitian Terdahulu

NO	PENGARANG/ TAHUN	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Andhika Utama dan Dudi Wahyudi (2016)	Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta	Religiusitas dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018)	Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening	Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak mampu memediasi sebagian pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Gusti Ayu Raisa Ersania dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2018)	Pengaruh Penerapan <i>E- system</i> Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penerapan <i>E- system</i> Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kuantitatif	Penerapan <i>E- system</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4	Jumadil Ismail, Gasim, dan Fitriningsih Amalo (2018)	Pengaruh Penerapan sistem <i>E- Filing</i> terhadap	Penerapan Sistem <i>E- filing</i> , Sosialisasi, dan	Kuantitatif	Penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh signifikan terhadap

		Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi	Kepatuhan Wajib Pajak		kepatuhan wajib pajak, sosialisasi dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem <i>e- filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Lina Nurlaela (2017)	Pengaruh Penerapan <i>E- Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut	Penerapan <i>E- filing</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Penerapan <i>E-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
6	Made Okvan Dwi Purwadi dan Putu Ery Setiawan (2019)	Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Religiusitas, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kuantitatif	Religiusitas, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
7	Dian Lestari Siregar (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam	Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kuantitatif	Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.16 Rumusan Hipotesis

2.16.1 Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Filing merupakan salah satu fasilitas yang dirancang oleh DJP untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. *E-Filing* juga diartikan sebagai sistem *online* yang *realtime* untuk menyampaikan SPT atau memperpanjang SPT Tahunan pada website DJP

(www.pajak.go.id)⁴³. Kepatuhan perpajakan menurut keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000 tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku umum dalam suatu Negara.

Dalam menjelaskan perilaku wajib pajak teori atribusi sangat relevan, dimana menentukan perilaku patuh wajib pajak dapat dilihat dari faktor eksternal maupun faktor internal. Menurut teori atribusi, penerapan sistem *e-filing* merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku individu sesuai dengan keadaan atau faktor eksternal. Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan berbagai fasilitas kemudahan dan kenyamanan dalam melayani wajib pajak, salah satunya yaitu menerapkan sistem *e-filing*. Dengan adanya sistem *e-filing* ini wajib pajak dapat melaporkan kewajiban perpajakannya secara *online* yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke kantor pajak. Situasi ini membuat wajib pajak yang tidak sempat datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT dapat menggunakan sistem *e-filing* dan menjadikan wajib pajak lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan diterapkannya sistem *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Lina Nurlaela yang menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak, baik dalam hal kecepatan pelaporan SPT, kehematan dalam pelaporan, tidak merepotkan, serta kelengkapan data dalam pengisian SPT. Hal ini berarti penerapan sistem *efiling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak⁴⁴. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Aprilliani Kasandra Tumuli, Jullie J. Sondakh, dan Heince R.N Wokas menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* memiliki dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak⁴⁵. Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

⁴³ Ersania dan Merkusiwati, "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

⁴⁴ Nurlaela, "Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut."

⁴⁵ Tumuli, Sondakh, dan Wokas, "ANALISIS PENERAPAN E-SPT DAN E-FILING DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO)."

2.16.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo, pelanggaran terhadap aturan perpajakan dapat dihindari dengan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa norma perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan ⁴⁶.

Penjelasan perilaku wajib pajak dalam teori atribusi sangat relevan, dimana menentukan perilaku patuh wajib pajak dapat dilihat dari faktor eksternal maupun faktor internal. Menurut teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam berperilaku berdasarkan keadaan. Wajib pajak cenderung berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya sebab adanya sanksi perpajakan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pelanggarnya. Sanksi perpajakan yang diterapkan memiliki tujuan untuk mendisiplinkan Wajib Pajak. Jika sanksi perpajakan banyak merugikan, maka para wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga semakin berat sanksi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Faradilla Savitri dan Elva Nuraina menunjukkan bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ⁴⁷. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Made Okvan Dwi Purwadi dan Putu Ery Setiawan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak ⁴⁸. Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.16.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jika seseorang dalam kehidupan sehari-hari bersikap jujur maka akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajibannya. Salah satu kewajiban wajib pajak yaitu kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya. Wajib

⁴⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*.

⁴⁷ Savitri dan Nuraina, "Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama madiun."

⁴⁸ Purwadi dan Setiawan, "Pengaruh Religiusitas , Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak ⁴⁹.

Dalam menjelaskan perilaku wajib pajak teori atribusi sangat relevan, dimana menentukan perilaku patuh wajib pajak dapat dilihat dari faktor eksternal maupun faktor internal. Menurut teori atribusi, religiusitas merupakan faktor internal yang memengaruhi perilaku wajib pajak sesuai dengan kendali pribadi wajib pajak tersebut. Religiusitas berhubungan dengan sejauh mana individu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dan menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apabila wajib pajak berperilaku sudah mencerminkan komitmen dalam agamanya dan menerapkannya dalam kehidupan, maka diharapkan dapat menjadi kontrol bagi perilaku wajib pajak yang sesuai dalam segala aspek baik terutama dalam kepatuhan perpajakan. Tingkat religiusitas yang tinggi dapat mencegah wajib pajak untuk melakukan perilaku yang menyimpang dan melanggar undang-undang, termasuk undang-undang perpajakan. Dengan dasar keyakinan wajib pajak jika melanggar aturan agama akan merasa berdosa, maka wajib pajak akan berusaha patuh juga terhadap kewajiban pajak. Kewajiban pajak ini ditepati karena ajaran agama memberikan ajaran untuk bersikap jujur. Semakin tinggi tingkat religius yang dimiliki wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi menunjukan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ⁵⁰. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yukha Ilaiyyah bahwa religiusitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak ⁵¹. Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃: Religiusitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak

2.17 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai pengaruh penerapan E-Filing, sanksi pajak, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan E-Filing,

⁴⁹ Ermawati dan Afifi, "PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING."

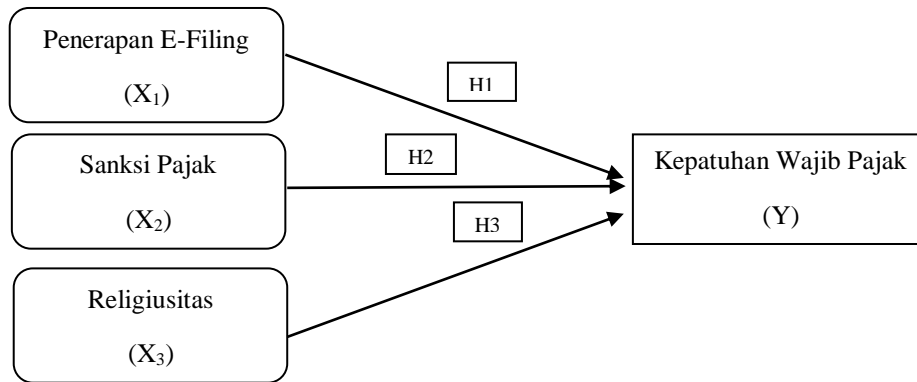
⁵⁰ Ermawati dan Afifi.

⁵¹ YUKHA ILAIYYAH, "PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PPh 21" (UIN Walisongo Semarang, 2019).

sanksi pajak, dan religiusitas diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut kerangka pemikiran dijelaskan pada gambar 2.1

Gambar 1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi dari sumbernya. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber eksternal, yaitu diperoleh dari penyebaran daftar pertanyaan atau kuisioner kepada wajib pajak orang pribadi di Semarang.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan skala likert interval. Skala likert digunakan untuk mengukur pendapat responden dengan lima tingkat preferensi, sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu². Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berdomisili di Kota Semarang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut³. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi (karyawan dan

¹ Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF* (Bandung: ALFABETA, 2019).

² Sugiyono.

³ Sugiyono.

nonkaryawan). Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan rumus Roscoe dalam buku *Research Methods For Business* sebagai berikut ⁴ :

20 x variabel yang diteliti (independen + dependen)

20 x 4 = 80 sampel

Maka sampel yang digunakan untuk penelitian yaitu sebanyak 80 sampel.

3.4 Metode Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel

Metode penelitian ini menggunakan metode survei. Metode survei merupakan metode yang menggunakan atau mempelajari data dari sampel suatu populasi yang mana data tersebut digunakan untuk mengambil suatu generalisasi yang tidak mendalam ⁵. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu melalui penyebaran kuesioner. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *incidental sampling*. *Iccidental sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Sehingga wajib pajak orang pribadi yang secara kebetulan/insedental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila orang tersebut dipandang cocok sebagai sumber data ⁶.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui penyebaran kuesioner, yaitu dengan mengirim daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Penyebaran kuesioner ini difokuskan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Semarang.

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Pada dasarnya penentuan variabel penelitian merupakan operasional kontrak supaya dapat diukur. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak (Y) yang diukur menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian Ermawati (2018) dan Saraswati (2012). Variabel independen penerapan sistem *E-filing* (X1) diukur dengan indikator yang dikembangkan dari penelitian Dwi (2019), dan Muthmainna (2017). Sanksi perpajakan (X2) diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian Arum (2012), Religiusitas (X3) diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian Basri (2012). Dalam penelitian ini operasional variabel penelitian dan pengukuran variabel dapat dilihat pada tabel 3.

⁴ Sugiyono.

⁵ Sugiyono.

⁶ Sugiyono.

Tabel 5

Variabel, Definisi Operasi, Indikator, dan Skala Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Sikap wajib pajak yang secara suka rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri, dan melaporkan pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan SPT tepat waktu 2. Mengisi formulir SPT dengan benar 3. Mengisi formulir SPT dengan lengkap 4. Mengisi formulir SPT dengan jelas 	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala ordinal
Penerapan sistem e-filing (X1)	Suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online dan realtime	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan SPT dengan menggunakan e-filing 2. Memudahkan pelaporan SPT 3. Kemudahan dalam menggunakan e-filing 4. Meminimalisir penggunaan kertas, biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak. 	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala ordinal
Sanksi Pajak (X2)	Sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi oleh wajib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak 	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala ordinal

	pajak atau sanksi perpajakan sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan	2. Saanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan	
		3. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak	
		4. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan	
Religiusitas (X3)	Kepercayaan kepada Tuhan disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini ditetapkan oleh Allah	1. Keyakinan 2. Praktik agama 3. Pengetahuan agama	Diukur melalui angket dengan menggunakan skala ordinal

Sumber: Ermawati dan Afifi (2018)⁷, Saraswati (2012)⁸, Dwi, et al (2019)⁹, Muthmainna (2017)¹⁰, Arum (2012)¹¹, dan Basri (2012)¹². Data Diolah Penulis

⁷ Ermawati dan Afifi, "PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING."

⁸ Anggun Kurnia Saraswati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)," *Universitas Diponegoro Semarang* (Universitas Diponegoro, 2012).

⁹ Dwi, Tanno, dan Ismail, "PENGARUH PENERAPAN E-SISTEM, SANKSI PAJAK, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK PRIBADI PELAKU BISNIS DI KPP PRATAMA BUKITTINGGI)."

¹⁰ Nurul Muthmainna, "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng," *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar* (Universitas Diponegoro, 2017).

3.7 Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, yaitu analisis yang lebih dari satu variabel independen. Teknik analisis berganda dipilih karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel independen. Metode analisis data akan menggunakan bantuan program dari aplikasi SPSS.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi¹³. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu frekuensi masing-masing variabel dan besaran nilai kumulatif. Untuk menentukan kriteria variabel sebagai berikut:

Tabel 6
Kriteria Variabel

Nilai	Kriteria
1,00 – 7,33	Rendah
7,34 – 13,67	Sedang
13,68 – 20,00	Tinggi

3.7.2 Uji Instrumen

Uji instrument yang digunakan meliputi uji reliabilitas dan uji validitas.

¹¹ Harjanti Puspa Arum, "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)," *Jurnal Perpajakan (JEIAK)* (Universitas Diponegoro, 2012).

¹² Yesi Mutia Basri, "Pengaruh Dimensi Budaya Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak," *Akuntabilitas* 8, no. 1 (2015): 61–77, <https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2764>.

¹³ Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*.

3.7.2.1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi butir-butir yang ada pada kuesioner atau untuk menguji kesamaan data pada waktu yang berbeda ¹⁴. Kuesioner reliabel adalah yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama ¹⁵. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relative tidak berbeda apabila dilakukan kembali pada subyek yang sama. Suatu data dapat dikatakan reliable jika nilai *alpha cronbach's* $> 0,5$ ¹⁶.

3.7.2.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji apakah kuesioner yang digunakan dalam penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur atau mampu mendeskripsikan suatu variabel ¹⁷. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pada keusioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu data dikatakan valid apabila r hitung $>$ dari r tabel atau nilai signifikansi $\leq 0,1$ ¹⁸.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedasititas.

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normalitas atau tidak. Uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak ¹⁹. Model regresi yang baik adalah yang memiliki data yang terdistribusi

¹⁴ Sugiyono.

¹⁵ Sugiyono.

¹⁶ Agus Widarjono, *ANALISIS REGRESI DENGAN SPSS*, Edisi 1 (UPP STIM YKPN, 2018).

¹⁷ Widarjono.

¹⁸ Widarjono.

¹⁹ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012).

normal. Uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* yang mana suatu data dikatakan normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $< 0,05$ ²⁰.

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ditemukan korelasi antar variabel bebas yang mana seharusnya tidak terjadi dalam model regresi yang baik²¹. Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran IF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Toleransi mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Suatu data dikatakan terjadi multikonearitas jika nilai VIF > 10 dan nilai toleransi $< 0,1$ ²².

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Suatu data dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas ketika grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah sumbu Y²³.

3.7.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

²⁰ Widarjono, *ANALISIS REGRESI DENGAN SPSS*.

²¹ Mega Sriningsih, Djoni Hatidja, dan Jantje D Prang, "Penanganan Multikolinearitas Dengan Menggunakan Analisis Regresi Komponen Utama Pada Kasus Impor Beras Di Provinsi Sulut," *Jurnal Ilmiah Sains* 18, no. 1 (2018): 18, <https://doi.org/10.35799/jis.18.1.2018.19396>.

²² Jeremiah Reinhart Assa, Lintje Kalangi, dan Winston Pontoh, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado," *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14, no. 1 (2018): 516–22, <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21412.2018>.

²³ Erna Sulvina, Patricia Dhiana, dan Hartono, "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan P2 dengan Kondisi Keuangan sebagai Pemoderasi di Desa Dlimoyo," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran* 4, no. 4 (2018): 1–15.

3.7.4.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen.²⁴ Regresi Berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filing*, sanksi perpajakan, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Analisis regresi berganda dinyatakan dalam fungsi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel sistem *e-filing*

β_2 = Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan

β_3 = Koefisien regresi variabel religiusitas

X_1 = Sistem *e-filing*

X_2 = Sanksi perpajakan

X_3 = Religiusitas

E = Standar error

3.7.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu $0 < R^2 < 1$. Nilai R^2 yang mendekati 1 menandakan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin kuat²⁵.

²⁴ Noor Farieda Awwaliyah, Ratno Agriyanto, dan Dessy Noor Farida, "The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance," *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 1, no. 1 (2019): 25–46.

²⁵ Akbar Taufiq dan Afiezan Adam, "DETERMINASI HARGA SAHAM SYARIAH MELALUI ANALISIS TERHADAP FAKTOR FUNDAMENTAL DAN MAKRO EKONOMI" 13, no. 1 (2018): 1–12.

3.7.4.3 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Uji koefisien regresi parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial ²⁶.

Hipotesis :

$$H_0 : b_1 = 0, \quad b_2 = 0$$

$$H_1 : b_1 \neq 0, \quad b_2 \neq 0,$$

H_0 : artinya sistem *e-filing*, sanksi perpajakan, dan religiusitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib apajak orang pribadi

H_1 : artinya sistem *e-filing*, sanksi perpajakan, dan religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib apajak orang pribadi

Kriteria Pengujian :

1. Nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka tidak ada pengaruh sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak.
2. Nilai signifikansi $\leq 0,05$ atau t hitung $\geq t$ tabel maka ada pengaruh sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima ²⁷.

²⁶ Widarjono, *ANALISIS REGRESI DENGAN SPSS*.

²⁷ Widarjono.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Responden

Gambaran umum responden dilihat berdasarkan demografi responden. Dalam penelitian ini demografi responden meliputi jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi di kota Semarang. Berikut tabel ringkasan dari demografi responden.

Tabel 7
Demografi Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin	Laki – Laki	60	75%
	Perempuan	20	25%
Usia	Antara 20-30 tahun	12	15%
	Antara 31-40 tahun	13	16,25%
	Antara 41-50 tahun	25	31,25%
	Diatas 50 tahun	30	37,5%
Tingkat Pendidikan	SMA	7	8,75%
	D3	3	3,75%
	S1	62	77,5%
	S2	4	5%
	Lainnya	4	5%

Sumber : diolah SPSS'23 (data primer)

Berdasarkan Tabel 7 sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki (75%), sisanya 25% berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat dari usianya, sebagian besar responden berusia diatas 50 tahun (37,5%). Sementara responden yang berusia antara 20-30 tahun sebanyak 15%, yang berusia antara 31-40 tahun sebanyak 16,25%, dan 31,25% responden berusia antara 41-50 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan terakhir S1 sebanyak 77,5%, 8,75% berpendidikan SMA, 3,75% berpendidikan D3, 5% berpendidikan S2 dan 5% berpendidikan lain-lain.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis tanggapan umum responden terhadap variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu penerapan sistem *e-filing*, sanksi perpajakan, religiusitas, dan kepatuhan wajib pajak. Statistik deskriptif yang digunakan yaitu nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Dapat dilihat hasil ringkasan analisis statistik deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini pada tabel 4.2.

Tabel 8
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Kriteria	Std. Deviation
Penerapan Sistem E-Filing	80	13,00	20,00	17,4500	Tinggi	1,77821
Sanksi Perpajakan	80	10,00	20,00	16,5375	Tinggi	1,97416
Religiusitas	80	7,00	15,00	13,2500	Sedang	1,50527
Kepatuhan Wajib Pajak	80	13,00	20,00	18,0875	Tinggi	1,64735
Valid N (listwise)	80					

Sumber : diolah SPSS'23 (data primer)

Berdasarkan tabel 8 diatas, jumlah data penelitian (N) setiap variabel dalam penelitian sebanyak 80. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh data yang ada dapat diolah. Dari hasil analisis deskriptif diatas, variabel penerapan sistem *e-filing* mempunyai nilai minimum 13 dan nilai maksimum 20. Nilai rata-rata penerapan sistem *efiling* sebesar 17,4500 dengan nilai standar deviasinya sebesar 1,77821. Pada variabel sanksi perpajakan dari 80 responden memiliki nilai minimum 10 dan nilai maksimum sebesar 20. Sedangkan nilai rata-rata 16,5375 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,97416. Variabel religiusitas memiliki nilai minimum sebesar 7 dan nilai maksimum 15. Sedangkan nilairata-rata sebesar 13,2500 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,50527. Variabel kepatuhan wajib pajak dari 80 data diolah memiliki nilai minimum 13 dan

nilai maksimum 20. Nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak sebesar 18,0875 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,64735.

4.2.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.2.2.1 Hasil Uji Validitas

Tujuan uji validitas kuesioner untuk mengetahui kesahihan kuesioner. Kuesioner dikatakan valid artinya bahwa kuesioner mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Kriteria pertanyaan pada kuesioner dapat dikatakan valid apabila nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} peneliti menggunakan alat bantu SPSS 23 sedangkan r_{tabel} menggunakan tabel yang terlampir dengan mengetahui terlebih dahulu derajat kebebasannya.

Dalam penelitian ini derajat kebebasan (*Degree of freedom*) adalah $df = n - 2$. Dengan ketentuan n (jumlah responden) adalah 80 responden, jadi besarnya $df = 80 - 2 = 78$ dengan α 0,05 (5%). Maka di dapat r_{tabel} 0,2199. Adapun uji validitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Pearson Correlation (R_{hitung})	R_{tabel}	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	X1.1	0,737	0,2199	Valid
	X1.2	0,744	0,2199	Valid
	X1.3	0,784	0,2199	Valid
	X1.4	0,638	0,2199	Valid
Sanksi Perpajakan	X2.1	0,693	0,2199	Valid
	X2.2	0,819	0,2199	Valid
	X2.3	0,855	0,2199	Valid
	X2.4	0,658	0,2199	Valid
Religiusitas	X3.1	0,795	0,2199	Valid
	X3.2	0,884	0,2199	Valid
	X3.3	0,889	0,2199	Valid

	Y1	0,618	0,2199	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y2	0,828	0,2199	Valid
	Y3	0,788	0,2199	Valid
	Y4	0,821	0,2199	Valid

Sumber : diolah SPSS'23 (data primer)

Berdasarkan tabel diatas perhitungan yang dilakukan menunjukan bahwa syarat minimum yang harus dipenuhi agar kuesioner dikatakan valid yaitu r_{hitung} lebih besar dari $r_{tabel} = 0,2199$ dapat terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dalam kuesioner dikatakan valid.

4.2.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Tujuan uji reliabilitas yaitu untuk mengetahui konsistensi jawaban setiap responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam setiap variabel. Dalam penelitian ini uji reliabilitas diukur dengan uji statistic *Cronbach Alpha Coefficient* (α). Kuesioner dikatakan reliable jika nilai *Cronbach Alpha Coefficient* (α) lebih dari 0,60. Berikut tabel hasil perhitungan uji reliabilitas :

Tabel 10

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha Coefficient</i> (α)	Keterangan
X1	0,697	Reliabel
X2	0,756	Reliabel
X3	0,813	Reliabel
Y	0,763	Reliabel

Sumber : diolah SPSS'23 (data primer)

Berdasarkan tabel 10 dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner reliabel karena syarat minimum *Cronbach Alpha Coefficient* (α) lebih dari 0,6 dapat terpenuhi.

Variabel X1 memiliki nilai *Cronbach Alpha Coefficient* (α) sebesar 0,697. Variabel X2 memiliki nilai *Cronbach Alpha Coefficient* (α) sebesar 0,756. Variabel X3 memiliki nilai *Cronbach Alpha Coefficient* (α) sebesar 0,813. Dan variabel Y memiliki nilai *Cronbach Alpha Coefficient* (α) sebesar 0,763. Semua

variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha Coefficient* (α) lebih dari 0,60 sehingga dapat dikatakan semua variabel dalam penelitian ini reliabel.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat kondisi data yang ada agar dapat menentukan model analisis yang paling tepat digunakan. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini yang digunakan untuk menguji normalitas data secara statistik uji yaitu Kolmogorov Smirnov satu arah, uji multikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF) dan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser. Uji otokorelasi tidak dilakukan karena data silang.

4.2.3.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menganalisis suatu sebaran data dengan nilai residualnya terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*¹. Data termasuk katagori normal jika nilai signifikan $> 0,05$. Berikut hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov* :

Tabel 11

Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		80
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1,50718039
Most Extreme Differences	Absolute	,068
	Positive	,056
	Negative	-,068
Test Statistic		,068
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

Sumber : hasil diolah SPSS'23 (data primer)

¹ Widarjono.

Sesuai dengan uraian diatas, menunjukan nilai signifikan (*Asymp.sig (2-tailed)*) adalah 0,200. Angka signifikan ini lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa sebaran data dalam penelitian ini terdistribusi normal, karena telah memenuhi syarat yaitu nilai signifikan $> 0,05$.

4.2.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk mengetahui serta menganalisis apakah ditemukan korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi penelitian. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independennya.²

Pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Nilai *tolerance* merupakan pengukuran untuk mengukur variabel independen yang terpilih namun tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai *tolerance* yang semakin rendah menandakan nilai VIF yang semakin tinggi, karena $VIF = 1/tolerance$.³ Nilai *cutoff* digunakan untuk mengetahui besaran nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), untuk penarikan kesimpulan nilai *cutoff* yang digunakan yaitu apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ sama dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 , maka model regresi tidak mengalami korelasi antar variabel independennya. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai *tolerance* $< 0,10$ sama dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 maka model regresi terdapat korelasi antar variabel independennya.⁴ Berikut hasil pengujian multikolonieritas:

Tabel 12

Hasil Pengujian Multikolonieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Penerapan Sistem E-	,983	1,017

² Sriningsih, Hatidja, dan Prang, "Penanganan Multikolinearitas Dengan Menggunakan Analisis Regresi Komponen Utama Pada Kasus Impor Beras Di Provinsi Sulut."

³ Widarjono, *ANALISIS REGRESI DENGAN SPSS*.

⁴ Assa, Kalangi, dan Pontoh, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado."

Filing		
Sanksi Perpajakan	,963	1,038
Religiusitas	,961	1,040

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : hasil diolah SPSS'23 (data primer)

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas diatas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dan nilai VIF pada variabel penerapan sistem *e-filing* menunjukkan angka 0,983 dan 1,017. Variabel sanksi perpajakan menunjukkan nilai *tolerance* sebesar 0,963 dan nilai VIF sebesar 1,038. Variabel religiusitas memiliki nilai *tolerance* 0,961 dan nilai VIF sebesar 1,040. Semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini bebas gejala multikolonieritas.

4.2.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik yaitu regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau model regresi yang terdapat kesamaan varian (homokedastisitas).⁵

Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan meregresi variabel-variabel independen dalam persamaan regresi dengan nilai residual sebagai variabel dependennya. Apabila nilai Sig. variabel independen yang dihasilkan $< 0,05$, maka data yang digunakan mengalami gejala heterokedastisitas. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai Sig. variabel independen yang dihasilkan $> 0,05$, maka dapat disimpulkan data yang digunakan bebas dari gejala heterokedastisitas. Berikut hasil pengujian heterokedastisitas:

⁵ Sulvina, Dhiana, dan Hartono, "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan P2 dengan Kondisi Keuangan sebagai Pemoderasi di Desa Dlimoyo."

Tabel 13
Hasil Pengujian Heterokedastisitas

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized	Standardized	t	Sig.	
		Coefficients	Coefficients			
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,801	1,368		,586 ,560	
	Penerapan Sistem E-Filing	,048	,055	,099	,861 ,392	
	Sanksi Perpajakan	-,010	,050	-,023	-,194 ,846	
	Religiusitas	-,018	,066	-,031	-,269 ,789	

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: hasil diolah SPSS'23 (data primer)

Dari hasil uji Glejser dalam tabel 13 pengambilan keputusan uji heterokedastisitas dilihat berdasarkan nilai Sig. masing-masing variabel independen. Variabel penerapan sistem *e-filing* memiliki nilai Sig sebesar 0,392 yang berarti lebih besar dari 0,05. Variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai Sig yang menunjukkan angka 0,846 dimana angka ini lebih besar dari 0,05. Dan variabel religiusitas memiliki nilai Sig sebesar 0,789 dimana angka ini melebihi 0,05.

Ketiga variabel dalam penelitian ini memiliki nilai Sig yang melebihi 0,05. Sehingga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heterokedastisitas karena telah memenuhi syarat nilai Sig > 0,05.

4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda adalah model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen.⁶ Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui atau menganalisis besarnya pengaruh penerapan sistem *e-filing*, sanksi perpajakan, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut hasil pengujiannya:

⁶ Widarjono, *ANALISIS REGRESI DENGAN SPSS*.

Tabel 14
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized	Standardized	t	Sig.	
		Coefficients	Coefficients			
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,424	2,430		4,702 ,000	
	Penerapan					
	Sistem E-	,222	,098	,240	2,263 ,027	
	Filing					
	Sanksi	,260	,089	,311	2,912 ,005	
	Perpajakan					
	Religiusitas	-,114	,117	-,104	-,971 ,335	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: hasil diolah SPSS'23 (data primer)

Berdasarkan tabel 14 menunjukkan output pengujian regresi linear berganda serta didapatkan rumus persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 11,424 + 0,222X_1 + 0,260X_2 - 0,114X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel sistem *e-filing*

β_2 = Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan

β_3 = Koefisien regresi variabel religiusitas

X_1 = Sistem *e-filing*

X_2 = Sanksi perpajakan

X_3 = Religiusitas

e = Standar error

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Koefisien (α) = nilai konstanta dari persamaa regresi linear berganda dalam penelitian ini sebesar 11,424 menyatakan bahwa jika variabel penerapan sistem *e-filing*, sanksi perpajakan, dan religiusitas bernilai nol, maka nilai konstanta dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 11,424.
- b. Koefisien X_1 (Penerapan Sistem *E-filing*)

Nilai koefisien regresi X_1 dalam persamaan diatas sebesar positif 0,222, Hal ini menunjukkan apabila variabel-variabel independen yang lain bersifat konstan, maka setiap kenaikan penerapan sistem *e-filing* sebesar 1 persen akan diikuti dengan kenaikan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,222 persen.

c. Koefisien X_2 (Sanksi Perpajakan)

Nilai koefisien regresi X_2 dalam persamaan diatas sebesar positif 0,260. Hal ini menunjukkan apabila variabel-variabel independen yang lain bersifat konstan, maka setiap kenaikan sanksi perpajakan sebesar 1 persen akan diikuti dengan kenaikan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,260 persen.

d. Koefisien X_3 (Religiusitas)

Nilai koefisien regresi X_3 dalam persamaan diatas sebesar negative 0,114. Hal ini menunjukkan apabila variabel-variabel independen lainnya bersifat konstan, maka setiap kenaikan religiusitas sebesar 1 persen akan diikuti dengan penurunan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,114 persen.

4.2.5 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Uji koefisien regresi parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t ini merupakan bahan pertimbangan apakah suatu hipotesis penelitian akan diterima atau ditolak. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh antar variabel penelitian, berikut kriteria pengujiannya :

1. Apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$ atau $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependennya.
2. Apabila nilai signifikansi $\geq 0,05$ atau $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependennya.⁷

Diketahui t_{tabel} untuk $df = n-k-1$, dimana n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel bebas. Jadi $df = 80-3-1 = 76$ dan tingkat signifikansi 0,05, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,991

⁷ Widarjono.

Tabel 15
Hasil Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11,424	2,430		4,702	,000
1 Penerapan Sistem E-Filing	,222	,098	,240	2,263	,027
Sanksi Perpajakan	,260	,089	,311	2,912	,005
Religiusitas	-,114	,117	-,104	-,971	,335

Sumber: hasil diolah SPSS'23 (data primer)

Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS yang telah dilakukan, didapatkan penjabarannya yaitu:

1. Pengujian terhadap variabel penerapan sistem *e-filing*
Angka signifikan yang dimiliki variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar 0,027. Dan nilai t_{hitung} sebesar 2,263 sedangkan t_{tabel} 1,991. Sehingga nilai t_{hitung} 2,263 > t_{tabel} 1,991 dengan tingkat signifikan 0,027 < 0,05 (taraf signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Pengujian terhadap variabel sanksi perpajakan
Angka signifikan yang dimiliki variabel sanksi perpajakan menunjukkan angka 0,005. Dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,912 sedangkan t_{tabel} 1,991. Sehingga nilai t_{hitung} 2,912 > t_{tabel} 1,991 dengan tingkat signifikan 0,005 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima.
3. Pengujian terhadap variabel religiusitas
Variabel religiusitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,335. Dengan nilai t_{hitung} -0,971 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,991. Sehingga nilai t_{hitung} -0,971 < t_{tabel} 1,991 dengan nilai signifikan 0,335 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H_0 diterima dan H_3 ditolak.

4.2.6 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu $0 < R^2 < 1$.⁸ Apabila nilai R^2 semakin mendekati 1 menandakan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin kuat. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai R^2 semakin mendekati angka 0 maka menandakan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen kurang informasi. Berikut hasil pengujian koefisien determinan (R^2) :

Tabel 16
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,788 ^a	,621	,602	1,763

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Penerapan Sistem E-Filing, Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: hasil diolah SPSS'23 (data primer)

Berdasarkan tabel 16 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) yang didapat adalah 0,602. Hal ini menunjukkan besarnya presentase variabel independen penerapan sistem *e-filing*, sanksi perpajakan, dan religiusitas dalam menjelaskan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 60%. Sedangkan 40% sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data

4.3.1 Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini hipotesis pertama yang diajukan menyatakan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil dari data penelitian yang sudah diolah dan diuraikan dalam tabel 15, diketahui nilai t_{hitung} variabel penerapan sistem *e-filing* adalah 2,263 dan t_{tabel} sebesar 1,991. Dimana nilai t_{hitung} (2,263) >

⁸ Taufiq dan Adam, "DETERMINASI HARGA SAHAM SYARIAH MELALUI ANALISIS TERHADAP FAKTOR FUNDAMENTAL DAN MAKRO EKONOMI."

t_{tabel} (1,991), maka penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan tingkat signifikan sebesar $0,027 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan yang didapat sesuai dengan penelitian milik Gusti Ayu RAisa Ersania dan Ni Ketut Lely Aryani (2018), Gebi Sintia Dwi, Aries Tanno, dan Ismail Novel (2019). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semakin baik penerapan sistem *e-filing* tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Dengan kemudahan dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT Tahunan) menggunakan sistem *e-filing* dapat memberikan dorongan bagi wajib pajak dengan alasan yang logis bahwa sistem tersebut memudahkan mereka karna dapat melaporkan SPT dimana saja tanpa harus datang ke kantor pajak.

Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian dari Maman Suherman, Medina Almunawwaroh, dan Rina Marlina (2015) yang menyatakan sebaliknya. Penerapan sistem *e-filing* tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Hal ini disebabkan karena masih banyak wajib pajak belum sadar dan menjalankan kewajiban perpajakannya, serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai modernisasi perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui sistem *e-filing*.⁹

Penerapan sistem *e-filing* memiliki tujuan untuk memberikan kenyamanan serta kepuasan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melaporkan SPT Tahunan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan pekerjaan wajib pajak menjadi lebih efisien karena wajib pajak tidak perlu mengantri ke kantor pajak serta dapat mengurangi penggunaan kertas untuk melaporkan SPT Tahunan. Karena cukup melaporkan SPT Tahunan secara online.

4.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua yang diajukan menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data penelitian yang telah diolah dan diuraikan dalam tabel 15, diketahui nilai t_{hitung} variabel sanksi perpajakan sebesar 2,912 dan t_{tabel} adalah 1,991. Dimana nilai t_{hitung} (2,912) > t_{tabel} (1,991), maka sanksi perpajakan

⁹ Suherman, Almunawwaroh, dan Marlina, "WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA TASIKMALAYA."

memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan nilai signifikan $0,005 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan yang didapat sesuai dengan penelitian milik Arinta Wulan Sari (2016), Dian Lestari Siregar (2017), dan Faradilla Savitri dan Elva Nuraina (2017) yang menyimpulkan bahwa semakin tegas sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh adanya pengenaan sanksi perpajakan dapat memberikan kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajibannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakan mereka.

Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Oktaviane Lidya Winerungan (2013) menyatakan sebaliknya, sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan di masing-masing kota.¹⁰

Masyarakat di Indonesia khususnya wajib pajak akan mematuhi aturan apabila sanksi denda serta sanksi pidana lebih banyak merugikannya, semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Untuk menghindari terkena denda yang merugikan wajib pajak harus mematuhi aturan yang berlaku. Sehingga dengan adanya sanksi perpajakan yang tegas maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

4.3.3 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data penelitian yang telah diolah serta diuraikan dalam tabel 15, diketahui nilai t_{hitung} variabel religiusitas adalah -0,971 sedangkan t_{tabel} 1,991. Nilai t_{hitung} (0,971) < t_{tabel} (1,991), sehingga variabel religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atau H_0 diterima dan H_3 ditolak dengan nilai signifikan $0,335 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

¹⁰ Oktaviane Lidya Winerungan, "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung," *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1, no. 3 (2013): 960–70, <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2301>.

Adanya pemahaman religiusitas wajib pajak seharusnya dapat mengontrol perilaku agar mematuhi aturan yang berlaku termasuk aturan pajak, namun, disisi lain dengan pemahaman agama yang semakin tinggi dapat merubah persepsi seseorang mengenai perpajakan menjadi lebih mengutamakan hubungannya dengan Tuhan dibandingkan hubungannya dengan manusia sebagai pimpinan sehingga dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak.¹¹

Kesimpulan yang didapat sesuai dengan penelitian yang dilakukan Muchamad Faizal dan Agung Yulianto (2019) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingginya tingkat religiusitas belum tentu menentukan tindakan wajib pajak terutama dalam hal perpajakan. Karena pada dasarnya manusia memiliki hubungan dengan Tuhan agar dalam hidup tidak terjerumus pada hal – hal yang melanggar aturan-Nya.¹² Sedangkan hasil penelitian Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018), dan Made Okvan Dwi Purwadi dan Putu Ery Setiawan (2019) menyatakan sebaliknya, religiusitas memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena jika religiusitas wajib pajak tinggi maka wajib pajak dapat membedakan perilaku baik dan buruk. Menurut wajib pajak dengan mematuhi aturan perpajakan sama saja dengan mematuhi ajaran agama.¹³

¹¹ Faisal dan Yulianto, “RELIGIUSITAS, NORMA SUBJEKTIF DAN PERSEPSI PENGELUARAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG KEPATUHAN WAJIB PAJAK.”

¹² Faisal dan Yulianto.

¹³ Ermawati dan Afifi, “PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING.”

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penerapan sistem *e-filing*, sanksi perpajakan, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Semarang, maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan sistem *e-filing* (X_1) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Semarang. Karena dengan adanya penerapan sistem *e-filing* memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya tanpa harus datang ke kantor juga bisa dilakukan kapanpun ketika wajib pajak memiliki waktu luang, selain itu *e-filing* dapat meminimalisir penggunaan kertas. Dengan adanya kemudahan tersebut dapat memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja serta sistem yang lebih mudah dan pastinya lebih akurat perhitungannya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penerapan sistem *e-filing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan (X_2) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Semarang. Wajib pajak akan lebih mematuhi kewajiban perpajakannya apabila sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar sangat merugikan. Sanksi yang tegas dapat memberikan rasa takut kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak akan menghindari sanksi tersebut dengan lebih mematuhi aturan perpajakan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Religiusitas (X_3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Semarang. Menurut Faisal dan Yulianto (2019) adanya pemahaman religiusitas wajib pajak seharusnya dapat mengontrol perilaku agar mematuhi aturan yang berlaku termasuk aturan pajak, namun, disisi lain dengan pemahaman agama yang semakin tinggi dapat merubah persepsi seseorang mengenai perpajakan menjadi lebih mengutamakan hubungannya dengan Tuhan dibandingkan hubungannya dengan manusia sebagai pimpinan sehingga dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, kekurangan, serta saran yang bisa dijadikan acuan evaluasi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan perbaikan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti merasa memiliki batasan-batasan seperti:

1. Kurang bisa mewakili apakah penerapan sistem *efiling*, sanksi perpajakan, religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota lain, karena ruang lingkup penelitian ini hanya di kota Semarang.
2. Dalam penelitian ini hanya memiliki tiga variabel independen, yaitu penerapan sistem *e-filing*, sanksi perpajakan, dan religiusitas serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian untuk penelitian selanjutnya dapat diperluas lagi, agar tingkat generalisasi populasinya dapat lebih luas, misalnya se-Jawa Tengah.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah atau mengganti variabel penelitian yang belum digunakan dalam penelitian ini, misalnya kesadaran diri wajib pajak dan keadaan ekonomi wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agriyanto, Ratno. "REDEFINING OBJECTIVE OF ISLAMIC BANKING ; STAKEHOLDERS PERSPECTIVE IN INDONESIA." *economica* VI, no. June 2014 (2015): 77–90.
- Arum, Harjanti Puspa. "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Universitas Diponegoro, 2012.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally. "Tafsir Jalalain." *Tafsir jalalain (terjemah)*, 2015, 448.
- Assa, Jeremiah Reinhart, Lintje Kalangi, dan Winston Pontoh. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14, no. 1 (2018): 516–22.
<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21412.2018>.
- Awwaliyah, Noor Farieda, Ratno Agriyanto, dan Dessy Noor Farida. "The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 1, no. 1 (2019): 25–46.
- Basri, Yesi Mutia. "Pengaruh Dimensi Budaya Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak." *Akuntabilitas* 8, no. 1 (2015): 61–77. <https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2764>.
- Dwi, Gebi Sintia, Aries Tanno, dan Novel Ismail. "PENGARUH PENERAPAN E-SISTEM, SANKSI PAJAK, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK PRIBADI PELAKU BISNIS DI KPP PRATAMA BUKITTINGGI)." *Jurnal Benefita* 4, no. 3 (2019): 477–91.
- Ermawati, Nanik, dan Zaenal Afifi. "PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 7, no. 2 (2018): 49–62.
- Ersania, Gusti Ayu Raisa, dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 22, no. 3 (2018): 1882–1908.

- Fahmi Hanifiyatun. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan.” *Journal Article*, 2016, 1–21.
- Faisal, Muchamad, dan Agung Yulianto. “RELIGIUSITAS, NORMA SUBJEKTIF DAN PERSEPSI PENGELUARAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG KEPATUHAN WAJIB PAJAK.” *Jurnal Kajian Akuntansi* 3, no. 2 (2019): 170–83.
- Farkhani. “Pidana Perpajakan dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* X, no. 2 (2016): 253–68.
- Gazali. “Pajak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VII, no. 1 (2015): 84–102.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- Hasan, Nurul Ichsan. “Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia.” *Islamadina* 19, no. 2 (2018): 75. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v19i2.2628>.
- Ikhsan, Arfan, dan Muhammad Ishak. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- ILAIYYAH, YUKHA. “PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PPh 21.” UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Isroah. *Perpajakan*. Yogyakarta: UNY, 2013.
- Khazanah. “Sistem Perpajakan di Masa Rasulullah.” *Republika.com*, 2016.
<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/03/16/omwyss313-sistem-perpajakan-di-masa-rasulullah>.
- Lubis, Arfan Ikhsan. *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016.
- Muthmainna, Nurul. “Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng.” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar*. Universitas Diponegoro, 2017.

- Nurlaela, Lina. “Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut.” *Jurnal Wahana Akuntansi* 02, no. 02 (2017): 001–008.
- Pajak, Direktorat Jenderal. “Halaman Laporan Kinerja DJP.” DJP, 2019.
<https://www.pajak.go.id/id/kinerja-page>.
- . “Lebih Dekat Dengan Pajak.” In *Buku Panduan Pajak*, 23, 2013.
- Parju. *PERPAJAKAN*. Semarang, 2017.
- Purwadi, Made Okvan Dwi, dan Putu Ery Setiawan. “Pengaruh Religiusitas , Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *e-Jurnal Akuntansi* 28, no. 3 (2019): 2110–25.
- Robbins, Stephen P, dan Timothy A Judge. *Perilaku Organisasi*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Saraswati, Anggun Kurnia. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta).” *Universitas Diponegoro Semarang*. Universitas Diponegoro, 2012.
- Savitri, Faradilla, dan Elva Nuraina. “Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama madiun.” *equilibrium* 5, no. 1 (2017): 45–55.
- Setiawan, Deny. “Prepestif Islam Mengenai Pajak : Suatu Studi Pendahuluan.” *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2010): 13–30.
- Siregar, Dian Lestari. “Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam.” *Jurnal of Accounting & Management Innovation* 1, no. 2 (2017): 119–28.
- Sriningsih, Mega, Djoni Hatidja, dan Jantje D Prang. “Penanganan Multikolinearitas Dengan Menggunakan Analisis Regresi Komponen Utama Pada Kasus Impor Beras Di Provinsi Sulut.” *Jurnal Ilmiah Sains* 18, no. 1 (2018): 18. <https://doi.org/10.35799/jis.18.1.2018.19396>.
- Sugiyono. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*. Bandung: ALFABETA, 2019.
- Suherman, Maman, Medina Almunawwaroh, dan Rina Marlina. “WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA KANTOR

PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA TASIKMALAYA.” *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 15, no. 1 (2015): 49–64.

Sulvina, Erna, Patricia Dhiana, dan Hartono. “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan P2 dengan Kondisi Keuangan sebagai Pemoderasi di Desa Dlimoyo.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran* 4, no. 4 (2018): 1–15.

Taufiq, Akbar, dan Afiezan Adam. “DETERMINASI HARGA SAHAM SYARIAH MELALUI ANALISIS TERHADAP FAKTOR FUNDAMENTAL DAN MAKRO EKONOMI” 13, no. 1 (2018): 1–12.

Tumuli, Apriliani Kasandra, Jullie J Sondakh, dan Heince Wokas. “ANALISIS PENERAPAN E-SPT DAN E-FILING DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO).” *Jurnal EMBA* 4, no. 3 (2016): 102–12.

Ulynnuha, Ovi Itsnaini. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta).” *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2018.
[http://eprints.ums.ac.id/59686/17/Naskah Publikasi-216.pdf](http://eprints.ums.ac.id/59686/17/Naskah_Publikasi-216.pdf).

Waluyo. *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Wardani, Dewi Kusuma, dan Rumiyaun. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2017): 15.
<https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>.

Widarjono, Agus. *ANALISIS REGRESI DENGAN SPSS*. Edisi 1. UPP STIM YKPN, 2018.

Winerungan, Oktaviane Lidya. “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung.” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1, no. 3 (2013): 960–70.
<https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2301>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1:

Kuesioner Penelitian

Kepada Yth
Saudara/I Wajib Pajak Orang Pribadi
Di Semarang

Dengan Hormat,

Sehubung dengan persyaratan dalam penyelesaian studi Strata Satu (S1) pada program Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, peneliti memerlukan beberapa informasi sebagai bahan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajak, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)”**

Dengan ini, peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/ Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Seluruh informasi yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan peneliti gunakan sebagai keperluan penelitian saja dan peneliti akan menjaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/saudara/I yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, peneliti ucapkan terimakasih.

Peneliti

Elisa Martha Hanum Basyaroh

I. Identitas Responden

Mohon Bapak/Ibu mengisi daftar pertanyaan berikut:

1. Nama Responden : _____
2. Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita
3. Usia : _____ tahun
4. Pendidikan Terakhir : ☐ SMA ☐ D3 ☐ S1 ☐ S2 ☐ Lainnya
5. NPWP : _____

II. Daftar Pertanyaan

Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi pertanyaan berikut dengan memberikan tanda checklist (✓) dalam kolom yang disediakan dengan keterangan: STS (1) : Sangat Tidak Setuju; TS (2) : Tidak Setuju; N (3) : Netral; S (4) : Setuju; SS (5) : Sangat Setuju.

• KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Saya menyampaikan SPT tepat pada waktunya					
2	Saya mengisi formulir SPT dengan benar					
3	Saya mengisi formulir SPT dengan lengkap					
4	Saya mengisi formulir SPT dengan jelas					

• PENERAPAN SISTEM *E-FILING* (X1)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filing</i> , saya dapat melaporkan SPT kapanpun ketika saya memiliki waktu luangan dan dimanapun saya berada tanpa harus ke Kantor Pajak					
2	Dengan diterapkannya <i>e-filing</i> , mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan					
3	Menurut saya <i>e-filing</i> mudah dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan <i>e-filing</i>)					
4	Menurut saya <i>e-filing</i> lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas					

• SANKSI PERPAJAKAN (X2)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Pemerintah akan menjatuhkan hukuman kepada saya jika menemukan bahwa saya tidak melaporkan beberapa atau seluruhnya pendapatan kena pajak					
2	Menurut saya sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat					
3	Saya merasa sudah sepantasnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan denda					
4	Menurut saya sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan					

• **RELIGIUSITAS (X3)**

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya meyakini seseorang yang taat pada perintah agama akan menaati perintah Negara termasuk membayar pajak.					
2	Saya yakin membayar pajak merupakan suatu amal kebaikan.					
3	Saya merasa berdosa apabila melakukan kecurangan yang berkaitan dengan pajak					

LAMPIRAN 2:

Jawaban Responden terhadap Masing-Masing Item Pertanyaan

1. KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

NO	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	KEPATUHAN WAJIB PAJAK
1	5	5	5	5	20
2	4	4	4	4	16
3	5	5	4	5	19
4	4	5	5	4	18

5	4	4	4	5	17
6	5	4	4	5	18
7	5	4	5	4	18
8	5	4	3	5	17
9	5	4	4	4	17
10	4	4	5	5	18
11	4	5	5	4	18
12	4	5	5	5	19
13	5	5	4	5	19
14	4	4	4	4	16
15	5	5	5	5	20
16	5	5	5	5	20
17	5	5	5	5	20
18	5	5	5	5	20
19	5	5	5	5	20
20	4	5	5	5	19
21	5	4	4	4	17
22	4	5	5	5	19
23	4	5	4	5	18
24	4	5	5	4	18
25	4	5	5	4	18
26	5	4	4	4	17
27	5	5	5	5	20
28	4	4	4	4	16
29	5	5	5	5	20
30	5	5	4	4	18
31	4	5	4	4	17
32	5	4	4	5	18
33	5	5	5	5	20
34	5	5	5	5	20

35	5	5	4	4	18
36	4	4	4	4	16
37	4	5	5	5	19
38	5	4	4	4	17
39	5	5	5	5	20
40	5	5	5	5	20
41	5	4	5	5	19
42	4	3	4	4	15
43	5	4	5	4	18
44	5	5	5	5	20
45	4	4	4	4	16
46	4	4	5	4	17
47	5	5	5	5	20
48	4	4	4	4	16
49	4	4	4	4	16
50	4	3	3	3	13
51	4	4	4	4	16
52	5	5	5	5	20
53	5	5	5	5	20
54	4	4	4	4	16
55	5	5	5	5	20
56	4	5	5	5	19
57	3	5	5	5	18
58	5	5	5	5	20
59	5	5	5	5	20
60	5	5	4	5	19
61	4	4	4	4	16
62	4	4	4	4	16
63	5	5	5	5	20
64	5	5	5	5	20

65	5	5	5	5	20
66	4	4	4	4	16
67	5	4	4	4	17
68	5	5	5	5	20
69	4	4	5	5	18
70	4	4	4	4	16
71	5	5	5	5	20
72	4	5	4	4	17
73	4	5	5	5	19
74	4	4	4	4	16
75	4	5	4	5	18
76	5	4	4	5	18
77	5	4	5	4	18
78	4	4	4	4	16
79	4	4	4	4	16
80	4	4	4	5	17

2. PENERAPAN SISTEM *E-FILING* (X.1)

NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	SISTEM <i>E-FILING</i>
1	4	4	4	5	17
2	5	5	5	5	20
3	5	4	4	4	17
4	4	5	4	4	17
5	4	3	4	5	16
6	4	3	4	5	16
7	4	5	4	5	18
8	4	5	5	5	19
9	5	5	4	3	17
10	4	3	3	5	15

11	5	4	4	5	18
12	5	4	5	4	18
13	4	5	4	4	17
14	5	5	4	5	19
15	4	4	3	5	16
16	5	5	3	5	18
17	5	5	3	5	18
18	5	4	3	5	17
19	5	4	5	5	19
20	4	5	5	4	18
21	4	5	4	5	18
22	5	5	5	5	20
23	4	4	5	4	17
24	5	4	4	5	18
25	5	4	5	4	18
26	5	4	4	4	17
27	4	4	4	4	16
28	5	5	5	5	20
29	4	5	4	5	18
30	4	4	3	4	15
31	5	5	5	5	20
32	4	5	5	4	18
33	4	4	3	5	16
34	4	4	4	5	17
35	4	4	4	4	16
36	3	4	3	4	14
37	4	4	3	4	15
38	5	5	4	4	18
39	4	4	4	4	16
40	4	5	4	5	18

41	5	5	5	5	20
42	4	3	3	4	14
43	4	4	4	4	16
44	5	5	5	5	20
45	5	5	5	5	20
46	4	4	3	4	15
47	5	5	5	5	20
48	4	4	3	4	15
49	4	4	4	5	17
50	4	4	4	4	16
51	5	4	4	5	18
52	5	5	5	5	20
53	5	5	4	5	19
54	5	5	3	4	17
55	5	5	5	5	20
56	4	4	4	5	17
57	4	4	4	5	17
58	5	4	5	5	19
59	4	4	5	4	17
60	5	5	5	5	20
61	4	4	3	4	15
62	4	4	4	4	16
63	4	3	3	4	14
64	5	5	4	5	19
65	4	4	5	5	18
66	4	5	4	4	17
67	4	3	3	3	13
68	4	5	4	5	18
69	4	4	4	4	16
70	4	4	3	4	15

71	5	5	5	5	20
72	4	4	4	4	16
73	5	5	5	5	20
74	4	4	3	4	15
75	5	5	4	5	19
76	5	4	5	4	18
77	5	5	4	5	19
78	5	5	5	5	20
79	4	4	4	5	17
80	5	4	5	5	19

3. SANKSI PERPAJAKAN (X.2)

NO	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	SANKSI PERPAJAKN
1	5	4	4	4	17
2	4	4	4	4	16
3	5	4	4	4	17
4	2	3	3	3	11
5	4	5	5	4	18
6	5	4	3	5	17
7	4	4	5	5	18
8	4	4	5	4	17
9	4	4	4	4	16
10	4	4	5	5	18
11	4	4	4	4	16
12	4	3	4	5	16
13	5	4	4	4	17
14	4	4	4	4	16
15	4	4	4	4	16
16	4	4	4	5	17
17	5	5	5	5	20
18	4	4	4	4	16
19	4	3	4	4	15
20	3	4	4	4	15
21	4	4	4	5	17
22	4	4	5	5	18
23	4	4	5	5	18
24	5	4	4	4	17
25	4	4	5	5	18
26	3	4	4	4	15

27	4	5	5	5	19
28	4	4	4	4	16
29	4	4	5	5	18
30	5	4	4	4	17
31	4	4	4	5	17
32	5	4	5	4	18
33	4	4	5	4	17
34	4	4	5	5	18
35	4	4	4	4	16
36	4	3	4	4	15
37	4	3	4	5	16
38	5	4	4	4	17
39	5	5	5	5	20
40	4	4	4	4	16
41	4	4	5	5	18
42	4	4	5	5	18
43	4	4	4	5	17
44	4	4	5	5	18
45	4	5	4	4	17
46	4	3	4	4	15
47	4	4	4	4	16
48	3	3	4	4	14
49	4	4	4	4	16
50	4	4	4	4	16
51	4	4	5	5	18
52	3	3	4	4	14
53	4	5	4	4	17
54	3	2	1	4	10
55	5	5	5	5	20
56	4	3	4	4	15

57	4	3	2	4	13
58	5	4	5	4	18
59	5	5	5	4	19
60	5	4	4	4	17
61	3	2	2	4	11
62	3	3	3	3	12
63	5	5	5	5	20
64	4	3	4	4	15
65	4	3	3	3	13
66	4	3	3	4	14
67	3	4	4	4	15
68	4	5	5	5	19
69	5	4	5	5	19
70	4	4	5	5	18
71	5	5	4	4	18
72	4	4	5	5	18
73	4	4	4	4	16
74	4	5	4	4	17
75	4	4	5	4	17
76	5	5	4	4	18
77	4	4	4	4	16
78	4	4	4	4	16
79	4	4	4	4	16
80	4	4	4	5	17

4. RELIGIUSITAS (X.3)

NO	X3.1	X3.2	X3.3	RELIGIUSITAS
1	5	5	5	15
2	5	5	5	15
3	4	4	4	12
4	4	5	5	14
5	4	5	4	13
6	4	5	5	14
7	5	4	4	13
8	4	4	4	12
9	5	4	4	13
10	5	4	5	14
11	4	5	5	14
12	4	5	4	13
13	3	4	4	11
14	4	4	4	12
15	4	4	4	12
16	4	4	4	12
17	5	4	4	13
18	4	5	5	14
19	4	4	4	12
20	4	5	5	14
21	5	4	4	13
22	5	5	5	15
23	4	4	4	12
24	4	5	5	14
25	4	5	5	14
26	5	5	5	15

27	4	5	5	14
28	4	5	5	14
29	5	4	5	14
30	4	4	4	12
31	4	5	5	14
32	5	4	4	13
33	4	4	4	12
34	5	5	5	15
35	5	5	5	15
36	5	4	4	13
37	4	4	4	12
38	4	5	5	14
39	4	4	4	12
40	4	4	4	12
41	4	4	4	12
42	4	4	4	12
43	5	4	4	13
44	5	5	5	15
45	5	5	5	15
46	4	4	5	13
47	4	4	4	12
48	5	5	5	15
49	5	5	5	15
50	4	4	4	12
51	4	5	5	14
52	5	5	5	15
53	5	5	5	15
54	3	3	3	9
55	5	5	5	15
56	2	2	3	7

57	5	5	4	14
58	5	5	5	15
59	4	5	4	13
60	5	5	5	15
61	4	5	4	13
62	4	4	4	12
63	5	5	5	15
64	4	4	4	12
65	4	4	4	12
66	5	5	5	15
67	5	4	4	13
68	3	4	4	11
69	5	5	5	15
70	4	4	4	12
71	4	4	4	12
72	5	5	5	15
73	5	4	4	13
74	5	4	5	14
75	4	4	4	12
76	4	4	4	12
77	5	5	5	15
78	4	4	4	12
79	5	5	5	15
80	4	4	5	13

LAMPIRAN 3:**ANALISIS DATA****Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Sistem E-Filing	80	13,00	20,00	17,4500	1,77821
Sanksi Perpajakan	80	10,00	20,00	16,5375	1,97416
Religiusitas	80	7,00	15,00	13,2500	1,50527
Kepatuhan Wajib Pajak	80	13,00	20,00	18,0875	1,64735
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Data Primer diolah, SPSS'23

Hasil Uji Validitas**1. Penerapan Sistem *E-filing* (X1)**

Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Penerapan Sistem E-Filing
X1.1	Pearson Correlation	1	,440**	,441**	,341**	,737**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,002	,000
	N	80	80	80	80	80
X1.2	Pearson Correlation	,440**	1	,416**	,299**	,744**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,007	,000
	N	80	80	80	80	80
X1.3	Pearson Correlation	,441**	,416**	1	,299**	,784**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,007	,000
	N	80	80	80	80	80
X1.4	Pearson Correlation	,341**	,299**	,299**	1	,638**
	Sig. (2-tailed)	,002	,007	,007		,000
	N	80	80	80	80	80
Penerapan	Pearson	,737**	,744**	,784**	,638**	1

Sistem E-Filing	Correlation					
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						

2. Sanksi Perpajakan (X2)

Correlations						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Sanksi Perpajakan
X2.1	Pearson Correlation	1	,518**	,368**	,250*	,693**
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,025	,000
	N	80	80	80	80	80
X2.2	Pearson Correlation	,518**	1	,623**	,302**	,819**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,006	,000
	N	80	80	80	80	80
X2.3	Pearson Correlation	,368**	,623**	1	,529**	,855**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000		,000	,000
	N	80	80	80	80	80
X2.4	Pearson Correlation	,250*	,302**	,529**	1	,658**
	Sig. (2-tailed)	,025	,006	,000		,000
	N	80	80	80	80	80
Sanksi Perpajakan	Pearson Correlation	,693**	,819**	,855**	,658**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).						

3. Religiusitas (X3)

Correlations					
		X3.1	X3.2	X3.3	Religiusitas
X3.1	Pearson Correlation	1	,493**	,518**	,795**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	80	80	80	80

X3.2	Pearson Correlation	,493**	1	,789**	,884**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	80	80	80	80
X3.3	Pearson Correlation	,518**	,789**	1	,889**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	80	80	80	80
Religiusitas	Pearson Correlation	,795**	,884**	,889**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations						
		Y1	Y2	Y3	Y4	Kepatuhan Wajib Pajak
Y1	Pearson Correlation	1	,282*	,239*	,386**	,618**
	Sig. (2-tailed)		,011	,032	,000	,000
	N	80	80	80	80	80
Y2	Pearson Correlation	,282*	1	,626**	,608**	,828**
	Sig. (2-tailed)	,011		,000	,000	,000
	N	80	80	80	80	80
Y3	Pearson Correlation	,239*	,626**	1	,525**	,788**
	Sig. (2-tailed)	,032	,000		,000	,000
	N	80	80	80	80	80
Y4	Pearson Correlation	,386**	,608**	,525**	1	,821**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	80	80	80	80	80
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	,618**	,828**	,788**	,821**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	80	80	80	80	80

*, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Reliabilitas

1. Penerapan Sistem *E-filing* (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,697	4

2. Sanksi Perpajakan (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,756	4

3. Religiusitas (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,813	3

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,763	4

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,50718039
Most Extreme Differences	Absolute	,068
	Positive	,056
	Negative	-,068
Test Statistic		,068

Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.	

2. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Penerapan Sistem E-Filing	,983	1,017
	Sanksi Perpajakan	,963	1,038
	Religiusitas	,961	1,040
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak			

3. Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	,801	1,368		,586
	Penerapan Sistem E-Filing	,048	,055	,099	,861
	Sanksi Perpajakan	-,010	,050	-,023	,194
	Religiusitas	-,018	,066	-,031	,269
a. Dependent Variable: ABRESID					

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	11,424	2,430		4,702
	Penerapan Sistem E-Filing	,222	,098	,240	2,263
	Sanksi Perpajakan	,260	,089	,311	2,912
	Religiusitas	-,114	,117	-,104	-,971
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,424	2,430		4,702	,000
	Penerapan Sistem E-Filing	,222	,098	,240	2,263	,027
	Sanksi Perpajakan	,260	,089	,311	2,912	,005
	Religiusitas	-,114	,117	-,104	-,971	,335
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,788 ^a	,621	,602	1,763
a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Penerapan Sistem E-Filing, Sanksi Perpajakan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

R TABEL

Tabel r untuk df = 51 - 100

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Elisa Martha Hanum Basyaroh

Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 2 Maret 1999

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Tambakharjo RT 04 RW 02, Kel. Tambakharjo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah

No. Telepon : 08812614485

Email : elishahanum@gmail.com

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan Formal :

No.	Pendidikan	Tahun
1.	SD Negeri Tambakharjo	2005 - 2011
2.	SMP Negeri 31 Semarang	2011 - 2014
3.	SMA Negeri 8 Semarang	2014 - 2017
4.	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	2017 - selesai